

Pedoman Mendorong Transisi Berkeadilan di Indonesia



Kolofon

Ditulis Oleh: Tari Lestari dan Balgis Inayah (Dala Institute)

Pengarah Penelitian: Aaron Atteridge

Koordinator Proyek: Nicole Kempis

Peninjau: Aidy Halimanjaya, Kuki Soejachmoen, Martha Maulidia, Julie-Anne Hogbin, Sascha Brandt, dan Joyashree Roy

Foto Sampul: Silas Baisch, Unsplash

Layout & Desain: Miesart - Michelle Haak

Kutipan yang disarankan: Lestari, T. and Inayah, B. (2023) Pedoman: Mendorong Transisi Berkeadilan di Indonesia. Climate Strategies

Penulisan laporan ini merupakan bagian dari inisiatif yang didanai oleh European Climate Foundation dan Porticus, namun tidak mewakili pandangan organisasi-organisasi tersebut.

Daftar Isi

Ringkasan eksekutif	5
Pengantar	7
Bagian 1. Penjelasan tentang transisi berkeadilan	9
1.1. Sejarah dan perkembangan	9
1.2. Definisi umum yang telah diadopsi	9
1.3. Cakupan dan dimensi	10
1.4. Area kebijakan dan pilar aksi	12
1.5. Prinsip-prinsip	14
1.6. Perkembangan terbaru	16
Bagian 2. Studi kasus dan konteks indonesia	18
2.1. Studi kasus dari berbagai negara di dunia	18
2.1.1. Transisi berkeadilan yang dipimpin oleh pemerintah nasional	18
2.1.2. Transisi berkeadilan yang dipimpin oleh pemerintah daerah	20
2.1.3. Transisi berkeadilan yang dipimpin oleh investor, serikat pekerja, usaha, dan masyarakat	21
2.1.4. Studi kasus lainnya	22
2.2. Transisi berkeadilan dalam konteks indonesia	23
2.2.1. Dokumen kebijakan	23
2.2.2. Perkembangan terbaru	23
2.2.3. Pembiayaan transisi berkeadilan di indonesia	25
2.2.4. Relevansi sektoral	26
Bagian 3. Rekomendasi	28
3.1. Untuk pemerintah nasional dan daerah	28
3.2. Untuk aktor non-pemerintah	29
3.3. Untuk perusahaan (bisnis)	30
3.4. Checklist perencanaan transisi yang adil	31
Lampiran 1. Daftar studi kasus lainnya	32
Lampiran 2. Country platform indonesia – energy transition mechanism (etm-cp)	34
Referensi	35

Daftar Isi

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Pedoman	7
Gambar 2. Kejadian bersejarah dalam perkembangan transisi berkeadilan	8
Gambar 3. Cakupan transisi berkeadilan	9
Gambar 4. Pemetaan pendekatan transisi berkeadilan	10
Gambar 5. Interaksi antara pilar dan area kebijakan untuk transisi berkeadilan	11
Gambar 6. Kegiatan dialog sosial	12
Gambar 7. Prinsip-prinsip transisi berkeadilan	13
Gambar 8. Proses transisi yang adil	13

Daftar Tabel

Tabel 1. Dimensi keadilan dalam transisi berkeadilan	10
Tabel 2. Pedoman dialog sosial dan praktik terbaik	12
Tabel 3. Daftar kerangka kerja, alat, dan pedoman yang ada untuk transisi berkeadilan	14
Tabel 4. Kebijakan, program, dan regulasi dengan pertimbangan inklusi dan kesetaraan sosial	24
Tabel 5. Daftar studi kasus lain untuk literatur lanjutan	29

Ringkasan Eksekutif

Pedoman Mendorong Transisi Berkeadilan di Indonesia ini bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan, pimpinan perusahaan, dan *Civil Society Organisation (CSO)* untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip transisi berkeadilan ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah, serta mendukung perumusan kebijakan transisi berkeadilan yang lebih spesifik. Pedoman ini juga mencakup daftar aksi-aksi yang mudah digunakan (*user friendly*) bagi semua pemangku kepentingan, serta *checklist* transisi berkeadilan.

Mengingat pentingnya industri batu bara di Indonesia, sebagian besar penduduk dapat terdampak dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Tantangan ini dapat dinavigasi dengan menggunakan prinsip transisi yang berkeadilan, yang memaksimalkan peluang dan juga memastikan tidak ada yang tertinggal.

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung transisi yang berkeadilan dalam beberapa kebijakan nasional dan internasional, seperti pada Deklarasi Silesia 2018 dan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions* atau NDC) Indonesia 2021. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan memastikan terwujudnya transisi berkeadilan (Deklarasi Bogor, 2019). Pada COP 26, pemerintah Indonesia mengumumkan kemitraan dengan Asian Development Bank untuk memprakarsai Mekanisme Transisi Energi atau *Energy Transition Mechanism* yang dirancang untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan di negara-negara prioritas. Pada G20 2022, Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (*Just Energy Transition Partnership* atau JETP) antara Indonesia dan negara-negara G7 diumumkan untuk memobilisasi pembiayaan awal sektor publik dan swasta sebesar USD 20 miliar untuk transisi energi yang berkeadilan di Indonesia, dan *Country Platform* untuk Mekanisme Transisi Energi Indonesia pun diluncurkan.

Pembelajaran dari Transisi Berkeadilan Internasional

Sudah terdapat banyak kerangka kerja dan *toolkits* yang mendukung perencanaan dan implementasi transisi berkeadilan, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan (Halaman 13, Gambar 6). Pembuat keputusan yang terlibat dalam perencanaan transisi berkeadilan juga dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain. Meskipun konteksnya mungkin tidak sama, namun terdapat prinsip-prinsip tertentu yang tetap konsisten.

- **Menunda proses transisi berkeadilan mengakibatkan meningkatnya biaya dan konsekuensi sosial.** Industri batu bara Jerman sudah mengalami penurunan drastis dari tahun 1950-an, tetapi baru pada tahun 2018 Pemerintah Jerman membentuk komisi batu bara untuk mendukung transisi tersebut. Hal ini mengakibatkan lebih tingginya biaya dan minimnya dukungan dari mereka yang kehilangan pekerjaan di awal masa transisi.
- **Melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengelola persaingan kepentingan.** Di Alberta (Kanada), koalisi daerah, satuan tugas pemerintah, dan program pendanaan mendukung transisi dari pertambangan batu bara sejak tahun 2015. Pendekatan ini melibatkan individu, bisnis, dan kelompok *First Nations* (masyarakat adat) dalam dialog untuk merencanakan transisi.
- **Kepemimpinan lokal adalah kunci.** Di Gothenburg (Swedia), kota madya setempat mendukung transisi kota tersebut dari pusat galangan kapal ke ekonomi berbasis pengetahuan. Perencanaan yang terpusat pada pemulihan lingkungan, dukungan sosial, dan investasi pendidikan tinggi mendukung perubahan ini.
- **Kerangka finansial yang kuat memungkinkan terwujudnya transisi.** Pada tahun 2016, pembangkit listrik tenaga batu bara dijadwalkan untuk ditutup di Victoria (Australia). Otoritas daerah membentuk zona pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut untuk mendorong kemitraan yang digerakkan secara lokal dan mendorong berbagai investasi untuk menciptakan hampir seribu pekerjaan dan melatih kembali ratusan pekerja.

Prinsip-Prinsip untuk Mewujudkan Transisi Berkeadilan di Indonesia

1. **Menentukan ruang lingkup transisi dan memahami pemangku kepentingan yang terkena dampak:** Pemangku kepentingan dapat mencakup pekerja dan masyarakat yang terkena dampak, perusahaan dalam rantai nilai, dan masyarakat luas.
2. **Mengembangkan strategi berbasis bukti untuk transisi berkeadilan:** Akses terhadap data yang andal sangat penting untuk mengembangkan peta jalan dan strategi yang efektif untuk transisi berkeadilan, mengukur kemajuan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program transisi.
3. **Merancang model tata kelola yang efektif:** Pengelolaan dan koordinasi upaya yang efektif, akuntabel dan transparan adalah kunci untuk memastikan partisipasi yang adil dan inklusif,

Ringkasan Eksekutif

meminimalkan dampak negatif ekonomi dan politik, serta melindungi kehidupan dan mata pencaharian kelompok yang paling rentan.

4. Dekarbonisasi industri yang menggunakan energi secara intensif: Mengelola potensi dampak pada sektor padat karbon membutuhkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di seluruh rantai nilai untuk mendukung peralihan ke ekonomi rendah karbon.

5. Membuka jalan untuk peluang baru: Peluang dampak positif transisi bisa berupa manfaat ekonomi makro, seperti diversifikasi ekonomi atau investasi di teknologi rendah karbon.

6. Terlibat dalam dialog sosial: Dialog sosial perlu dilakukan selama proses transisi berkeadilan. Kegiatan ini mendukung proses yang lebih inklusif untuk mencapai kompromi antara berbagai pemangku kepentingan dan menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau persaingan antar kepentingan.

Aksi yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mendukung Transisi Berkeadilan di Indonesia

- Menetapkan kerangka kerja atau komisi untuk mengelola transisi yang berkeadilan
- Membuat *database* pekerja terdampak yang terpusat dan dapat diakses untuk mendukung perencanaan daerah
- Mengembangkan indikator-indikator untuk memonitor dan mengevaluasi transisi berkeadilan
- Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dan transisi berkeadilan ke dalam kebijakan pertumbuhan dan ekonomi makro/lokal.
- Menetapkan strategi rencana nasional/daerah dan mengalokasikan dana untuk transisi berkeadilan
- Mengembangkan program pelatihan, jaminan sosial, dan hak-hak formal bagi pekerja yang rentan
- Mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial yang memastikan bahwa wanita, pemuda, dan kelompok marginal lainnya memiliki akses yang adil terhadap peluang yang diciptakan dalam transisi berkeadilan, dan supaya kesenjangan tidak jadi semakin parah atau terulang.
- Meningkatkan dialog sosial di semua tahapan proses.
- Mempersiapkan sistem pendidikan untuk mendukung transisi dengan menciptakan atau menambah jurusan-jurusan di bidang-bidang baru yang sesuai dengan arah transisi dan menjadikan perguruan tinggi sebagai ujung tombak dalam pengembangan riset dan teknologi untuk proses transisi.

Aksi yang dapat dilakukan oleh aktor non-pemerintah untuk mendukung Transisi Berkeadilan di Indonesia

- Meningkatkan kesadaran dan memberikan bimbingan
- Secara aktif berbagi pengetahuan dan praktik terbaik
- Memobilisasi pendanaan, dukungan, dan bantuan, dari organisasi dan donor internasional
- Mempromosikan kerja sama dengan aktor pemerintah dengan mengembangkan, menerapkan, dan memantau kebijakan sesuai dengan praktik nasional
- Mempromosikan praktik dan ketentuan yang baik terkait tenaga kerja, seperti pelatihan ulang, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengimplementasikan dukungan khusus bagi mereka yang terkena dampak
- Mengaktifkan dialog sosial di semua tingkatan

Aksi yang dapat dilakukan oleh bisnis/usaha untuk mendukung Transisi Berkeadilan di Indonesia

- Membuat peta kelompok-kelompok yang akan terkena dampak strategi dekarbonisasi, baik internal maupun eksternal di perusahaan.
- Berkomitmen untuk menghormati hak-hak karyawan
- Melibatkan para pekerja dalam dialog, khususnya seputar tema seperti restrukturisasi, rencana dekarbonisasi, dampak ketenagakerjaan, dan perluasan operasi hijau
- Membuat rencana bisnis jangka panjang yang memadukan prinsip-prinsip transisi berkeadilan
- Mengambil tindakan untuk menjalankan rencana transisi berkeadilan di seluruh fungsi bisnis yang relevan
- Bermitra dengan pemerintah, organisasi pengusaha, inisiatif regional/sektoral, dan lintas rantai pasokan untuk tindakan yang lebih terkoordinasi.
- Mengukur dan melaporkan tindakan, tantangan, dan dampak yang berkaitan dengan transisi berkeadilan

Pengantar

Perubahan iklim membawa dampak yang tidak proporsional bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, serta dapat memperburuk kesenjangan ekonomi, gender, dan sosial lainnya. Selain menghasilkan manfaat bagi masyarakat, transisi menuju emisi nol bersih (*net zero emissions*) juga berpotensi menimbulkan beberapa risiko negatif bagi tenaga kerja di sektor dan wilayah yang mengandalkan ekonomi berbasis karbon secara intensif. Jika tidak dikelola dengan baik melalui kebijakan dan proses transisi yang adil, perubahan-perubahan baik yang bersifat teknis atau ekonomis bisa jadi akan meningkatkan tantangan terkait mata pencaharian, kesenjangan sosial, penurunan produktivitas, dan pasar yang kurang kompetitif di tingkat lokal.

Perjanjian Paris 2015 menekankan pentingnya **transisi berkeadilan dan penciptaan lapangan kerja yang layak** sebagai dimensi penting dari aksi perubahan iklim. Transisi berkeadilan menghadirkan berbagai peluang untuk menciptakan pekerjaan ramah lingkungan yang layak, yang dapat berkontribusi terhadap pemberantasan kemiskinan dan inklusi sosial, sambil mencapai tujuan ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan bagi lingkungan dengan tidak meninggalkan satu orang pun. Tidak ada pendekatan “satu untuk semua” dalam transisi berkeadilan. Kebijakan dan program perlu dirancang sesuai dengan kondisi spesifik suatu negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, sudah mulai menyusun rencana nasional untuk transisi berkeadilan. Meskipun beberapa kemajuan penting sudah terwujud, masih ada beberapa tantangan yang tersisa, seperti perlunya menerjemahkan komitmen

internasional ke dalam kebijakan dan program dalam negeri dan memastikan keberhasilan implementasi dari program dan kebijakan tersebut.

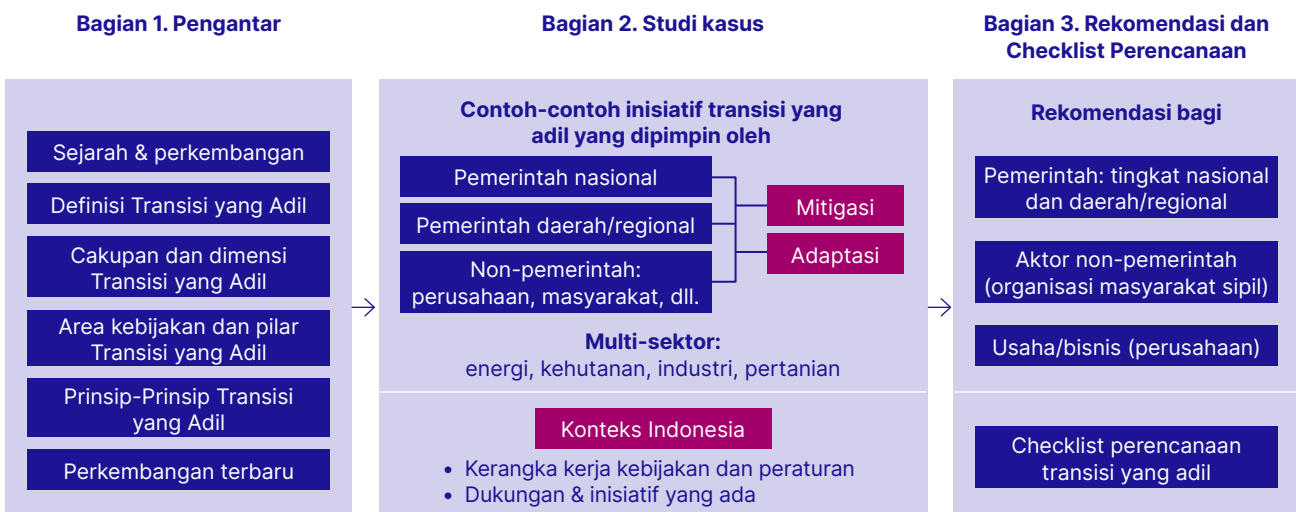
Pedoman ini dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip transisi berkeadilan ke dalam agenda pembangunan nasional dan lokal, dan juga pemangku-pemangku kepentingan lainnya (seperti organisasi masyarakat sipil dan perusahaan swasta) dalam membantu perencanaan dan implementasi transisi berkeadilan di Indonesia. Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk umum yang menitikberatkan pada pemahaman konseptual tentang transisi berkeadilan. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk melengkapi pedoman-pedoman dan praktik-praktik terbaik transisi berkeadilan yang lebih spesifik yang sudah ada (misalnya bagi investor, lembaga keuangan, dan kaum muda).

Struktur Pedoman

Bagian pertama dari pedoman ini memperkenalkan konsep transisi berkeadilan untuk memberikan pemahaman dasar tentang konsep tersebut beserta penerapannya bagi pembaca. Pada Bagian 2, studi kasus dari beberapa negara di dunia yang memaparkan inisiatif transisi berkeadilan yang dipimpin oleh pemerintah nasional, pemerintah daerah/regional, maupun aktor non-pemerintah (misalnya masyarakat maupun perusahaan) akan disajikan untuk memberikan contoh bahwa setiap pemangku kepentingan dapat berperan dalam menginisiasi dan mengimplementasi transisi berkeadilan. Selain itu, bagian ini juga memaparkan ulasan singkat tentang kerangka kebijakan dan

Gambar 1. Struktur Pedoman

Sumber: Penulis.



Pengantar

peraturan yang relevan dengan transisi berkeadilan, serta daftar inisiatif dan dukungan yang sudah ada dari berbagai aktor di Indonesia. Terakhir, Bagian 3 menyajikan serangkaian rekomendasi untuk berbagai pemangku kepentingan, diikuti dengan *checklist* untuk merencanakan transisi berkeadilan. Struktur dan alur pedoman diilustrasikan pada Gambar 1.

Pedoman ini dikembangkan melalui metode *desk review* dengan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan, termasuk pedoman-pedoman terkait transisi berkeadilan yang sudah ada sebelumnya, *grey literature*, dan makalah akademis. Konsultasi pemangku kepentingan juga dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dan masukan untuk memperkaya informasi dalam finalisasi dokumen.

Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

1.1. Sejarah dan Perkembangan

Bermula dari tuntutan serikat pekerja, gagasan 'transisi berkeadilan' dimasukkan ke dalam Perjanjian Paris 2015 sebagai cara untuk memberikan sinyal akan pentingnya meminimalisasi dampak negatif dari kebijakan iklim dan memaksimalkan dampak sosial yang positif bagi para pekerja dan masyarakat. Pada COP 24 di Katowice, Polandia, 53 negara termasuk Indonesia menandatangani Deklarasi Solidaritas dan Transisi Berkeadilan Silesia yang mengakui pentingnya untuk memikirkan kebutuhan pekerja dan masyarakat sehubungan dengan peralihan ke kegiatan ekonomi nol karbon. Pada COP 26 tahun 2021 di Skotlandia, lebih dari 30 negara termasuk negara-negara penghasil batu bara terbesar di dunia menandatangani Deklarasi Transisi Berkeadilan. Belakangan ini, transisi berkeadilan menjadi lebih populer di kalangan pemangku kepentingan lainnya, termasuk para investor dan sektor perbankan. Gambar 2 menampilkan ilustrasi peristiwa-peristiwa penting dalam Transisi Berkeadilan.

1.2. Definisi Umum yang Telah Diadopsi

Penggunaan terminologi Transisi Berkeadilan telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Namun, tidak ada standar definisi formal

yang disepakati dan konsepnya tidak digunakan dengan sama oleh berbagai pihak. Perdebatan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagian besar berkisar pada cakupan dan penerapannya. Cakupan penerima manfaat dalam transisi berkeadilan dapat berkisar dari pekerja saja hingga ke masyarakat luas (yaitu semua pemangku kepentingan yang rentan yang mungkin terkena dampak langsung maupun tidak langsung). Demikian juga, penerapan konsep ini dapat masuk ke dalam tiga dimensi keadilan, yaitu keadilan prosedural, distributif dan restoratif (lihat Tabel 1). Bagi banyak pemangku kepentingan, Pedoman ILO 2015 untuk Transisi Berkeadilan merupakan acuan yang disepakati untuk memahami konsep transisi berkeadilan:

Kotak 1. Definisi Transisi Berkeadilan

Transisi Berkeadilan berarti menghijaukan ekonomi dengan cara yang seadil dan seinklusif mungkin bagi semua pihak yang terkait, menciptakan peluang kerja yang layak, dan tidak meninggalkan satu orang pun. Transisi ini adalah proses menuju ekonomi yang ramah lingkungan, yang "perlu dikelola dengan baik dan berkontribusi pada tujuan pekerjaan yang layak bagi semua, inklusi sosial dan pemberantasan kemiskinan" (ILO, 2015).

Gambar 2. Kejadian bersejarah dalam perkembangan transisi berkeadilan

Sumber: Penulis.



Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

Keadilan antar negara dan di dalam sebuah negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep transisi berkeadilan menjadi lebih populer Negara Bagian Selatan atau *Global South*. Misalnya, Indonesia saat ini tengah mengembangkan Platform Negara - Mekanisme Transisi Energi (*Energy Transition Mechanism Country Platform*); Afrika Selatan baru-baru ini membuat Cetak Biru Transisi Berkeadilan bagi Pekerja pada tahun 2022, dan India telah mendirikan Pusat Transisi Berkeadilan untuk mengembangkan pengetahuan dan mendorong pembelajaran sejawat/sebaya untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik terkait transisi. Dengan adanya perkembangan ini, konsep transisi berkeadilan semakin meluas dan dipandang sebagai upaya pemerataan antar negara, terutama antara *Global North* dan *Global South*, selain upaya pemerataan di dalam negara itu sendiri. Di Indonesia dikenal istilah “transisi yang adil dan terjangkau”, di mana istilah “terjangkau” ditujukan pada kesetaraan antar negara. Isu kesetaraan antar negara berkisar pada mendesaknya kebutuhan akan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan dampak perubahan iklim yang paling dirasakan oleh beberapa negara termiskin di dunia, dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi atau beradaptasi dengan dampak tersebut. Di saat yang sama, negara-negara ini seringkali memberikan kontribusi paling kecil terhadap emisi GRK dunia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari *Global North* ke *Global South* dalam mengurangi emisi GRK dan transisi ke ekonomi karbon yang lebih rendah.

Indikator untuk mengukur transisi berkeadilan.

Sampai saat ini, belum ada indikator atau metrik resmi untuk mengukur transisi yang adil. Mengingat berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh sebuah transisi, dan karena dibutuhkan respons lintas sektoral untuk mengatasi berbagai dampak ini, maka pengukuran kemajuan dan pencapaian transisi berkeadilan mungkin memerlukan kombinasi indikator dari berbagai bidang yang berbeda-beda. Sebuah studi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lingkungan Komisi Eropa tentang “Mengukur Transisi Berkeadilan di Uni Eropa dalam konteks Program Aksi Lingkungan ke-8: penilaian terhadap indikator dan kesenjangan dalam hubungan sosial-lingkungan, dengan usulan-usulan untuk langkah selanjutnya” pada tahun 2021 mencoba mengusulkan beberapa gabungan indikator baru seperti “*Transition Performance Index* - Indeks Kinerja Transisi” atau “*Leave no-one behind index* - Indeks tidak meninggalkan satu orang pun”, tetapi detail struktur dan operasionalnya belum dikembangkan.

Atteridge dan Strambo (2020) mengusulkan bahwa indikator untuk menilai kemajuan transisi berkeadilan seharusnya tidak hanya mencakup faktor-faktor penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi regional bersih, namun juga pada jenis-jenis pekerjaan yang diciptakan, siapa yang memiliki akses ke pekerjaan tersebut, dan tingkat ketangguhan dan inovasi masyarakat secara luas.

1.3. Cakupan dan Dimensi

Transisi berkeadilan berawal dari perspektif pekerja yang terkena dampak transisi, tetapi cakupannya meluas ke masyarakat, rantai pasok (konsumen, produsen, dan usaha/bisnis termasuk usaha kecil dan menengah), dan masyarakat secara lebih luas. Desain transisi berkeadilan yang dirancang dengan baik perlu mempertimbangkan semua aspek sosio-ekonomi pengurangan emisi GRK dan kebijakan pembangunan berkelanjutan agar mampu mengatasi berbagai macam konsekuensi yang timbul dari perubahan ekonomi secara menyeluruh, sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

Berdasarkan cakupan transisi berkeadilan di atas, *Just Transition Research Collaborative* (JTRC) mengidentifikasi empat pendekatan berbeda yang dipromosikan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 4.

Penerapan aksi-aksi dalam transisi berkeadilan dapat dibedakan ke dalam tiga dimensi keadilan, yaitu keadilan **prosedural, distributif, dan restoratif**. Keadilan prosedural (atau partisipatif) berfokus pada cara dan bentuk untuk memfasilitasi proses yang inklusif seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; keadilan distributif berhubungan dengan distribusi risiko dan tanggung jawab (untuk mengatasi dampak langsung yang ditimbulkan dari proses transisi); dan keadilan restoratif menangani pemulihan kembali atas kerusakan yang terjadi pada individu, masyarakat, dan lingkungan, dan menyediakan kerangka kerja untuk memulihkan atau memperbaiki keadaan (Montmasson-Clair, 2021).

Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

Gambar 3. Cakupan transisi berkeadilan

Sumber: Penulis berdasarkan (Robins & Rydge, 2019)



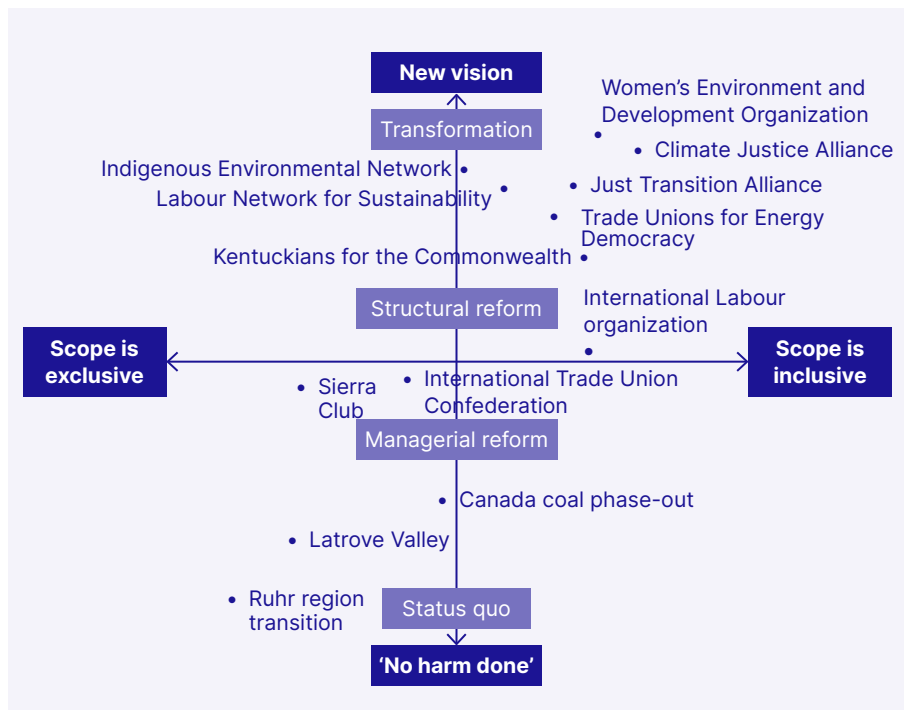
Gambar 4. Pemetaan pendekatan transisi berkeadilan

Sumber: Wuppertal Institute (2022). Just Transition Toolbox for coal regions

Transisi status quo: Dipimpin oleh bisnis dan korporasi, transisi ini berfokus pada potensi manfaat bagi bisnis dan konsumen, dan untuk mengganti pekerjaan 'lama' ke 'baru'. Istilah 'adil' terutama dipahami sebagai transisi yang menciptakan lapangan kerja baru, dengan hanya sedikit memperhitungkan faktor-faktor lain.

Transisi reformasi manajerial bertujuan untuk mencapai pemerataan dan keadilan yang lebih luas dalam sistem ekonomi dan politik yang ada. Peraturan dan standar tertentu diharapkan dapat diubah dan yang baru dapat dibuat, tetapi tidak perlu melakukan reformasi mendasar.

Transisi reformasi struktural: bertujuan untuk membuat perubahan yang lebih mendalam pada tingkat pengambilan keputusan, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dibanding mitra dialog tripartit tradisional. Transisi ini membutuhkan modifikasi struktur tata kelola untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dengan lebih baik.



Transisi transformatif: Selain reformasi struktural mendalam atau perombakan sistem ekonomi dan politik yang ada, transisi ini juga mempromosikan jalur alternatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah seperti rasisme, patriarki, dan diskriminasi kelas.

Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

Tabel 1. Dimensi keadilan dalam transisi berkeadilan

Sumber: (Montmasson-Clair, 2021)

Dimensi	Fitur utama	Contoh
Prosedural	<ul style="list-style-type: none">• Suara• Martabat dan sikap menghargai• Netralitas & transparansi• Kepercayaan	<ul style="list-style-type: none">• Keterlibatan publik• Forum masyarakat/akar rumput• Dukungan partisipasi bagi pihak-pihak rentan• Perpaduan dari demokrasi terbuka, langsung maupun perwakilan
Distributive	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan pasar tenaga kerja (pasif dan aktif)• Kebijakan industri (fungsional dan selektif)• Perlindungan sosial (baik dengan iuran maupun non-iuran)	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan upah minimum, standar kondisi kerja• Skema pelatihan ulang/peningkatan keterampilan ulang dan penempatan kerja, paket pensiun dini sukarela, dukungan pengembangan usaha• Pembiayaan industri, kebijakan pemberdayaan, peta jalan sektoral• Asuransi pengangguran, pendapatan dasar universal, subsidi, transfer sosial
Restorative	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan sosial ekonomi• Restorasi sosial budaya• Restorasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses ke rumah tinggal dan layanan publik• (Pertambahan) rehabilitasi lahan, perlindungan lingkungan• Penggunaan lahan yang tidak bersifat merusak• Kepemilikan sosial atas aset

Beberapa inisiatif transisi yang adil juga perlu mempertimbangkan **keadilan antar generasi**, yaitu mempersiapkan kondisi yang kondusif bagi generasi selanjutnya, terutama dalam transisi jangka panjang secara terencana yang dimulai sejak dini. Pada jenis transisi ini, dampak transisi akan dirasakan oleh generasi berikutnya (anak-anak dari pekerja dan masyarakat yang ada saat ini), dimana generasi sekarang kemungkinan besar sudah pensiun pada saat transisi terjadi.

Beberapa kelompok masyarakat, seperti masyarakat adat, perempuan, dan kaum muda, memiliki jenis kebutuhan yang berbeda dan cenderung lebih rentan. Seringkali, suara dan kebutuhan mereka tidak dianggap atau diabaikan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa suatu transisi bersifat adil dan inklusif, penting untuk memahami dan mengenali kebutuhan khusus mereka terkait dengan perubahan yang mungkin terjadi sebagai bagian dari transisi yang terencana (**keadilan rekognitif/pengakuan**).

1.4. Area Kebijakan dan Pilar Aksi

ILO mengusulkan tiga pilar kebijakan yang menjadi dasar transisi berkeadilan: **ekonomi makro dan sektoral, ketenagakerjaan, dan sosial**. ILO juga mengidentifikasi beberapa area kebijakan untuk memastikan pengembangan kerangka politik yang memadai untuk transisi yang adil di tingkat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Gambar 5

menyajikan interaksi antara pilar dan area kebijakan untuk transisi yang adil.

Pekerja informal. Sebagian besar pasar tenaga kerja di negara-negara berkembang (*Global South*) bersifat informal. Oleh karena itu, transisi yang adil juga harus mengakui keragaman kondisi kerja dan status kerja yang melibatkan para pekerja informal. Berbagai strategi perlu dikembangkan untuk lebih melibatkan para pekerja informal selama proses transisi berlangsung. Hal ini berimplikasi pada perlunya perluasan konsep 'dialog tripartit' yang dipromosikan oleh organisasi seperti ILO untuk mewakili semua jenis pekerja, terlepas dari apakah mereka anggota serikat pekerja yang terorganisir atau bukan.

Dialog sosial adalah kunci keberhasilan transisi yang adil karena merupakan sebuah mekanisme untuk memastikan proses yang lebih inklusif untuk mencapai kompromi dalam upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di antara para pemangku kepentingan berbeda yang juga memiliki berbagai kepentingan berbeda. Dialog sosial memiliki berbagai bentuk, seperti bipartit (serikat buruh/pekerja dengan manajemen/perusahaan), tripartit (pemerintah, perusahaan dan pekerja), atau multi-partit. Agenda (kegiatan) dialog sosial dapat berlangsung dengan tujuan untuk bernegosiasi, berkonsultasi, dan bertukar informasi antar pihak seperti yang dijelaskan pada Gambar 6.

Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

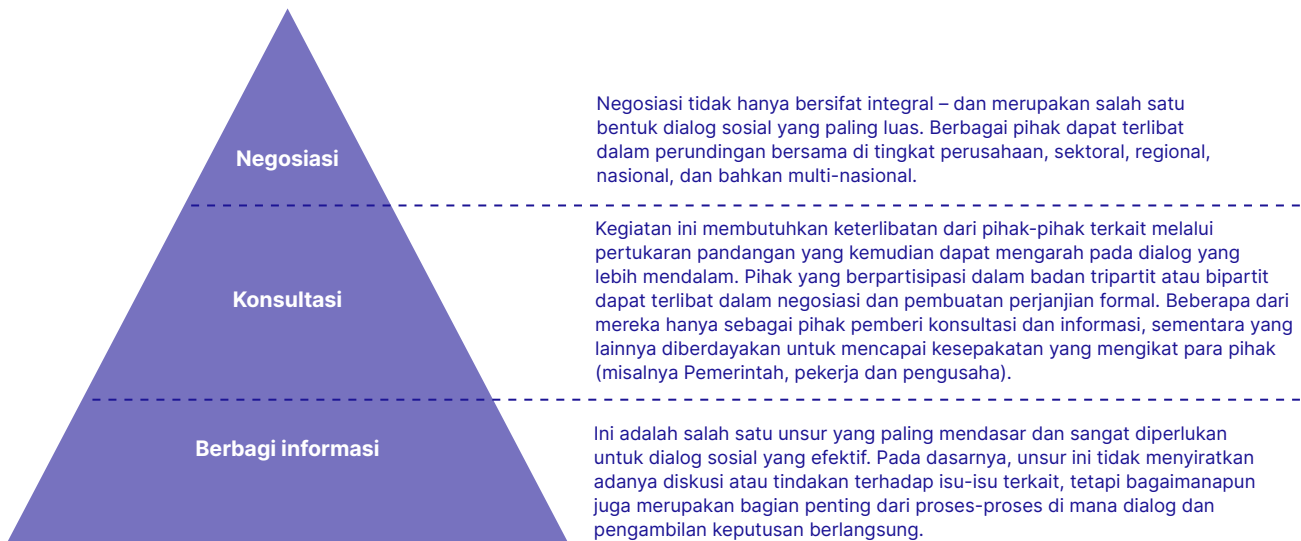
Gambar 5. Interaksi antara pilar dan area kebijakan untuk transisi berkeadilan

Sumber: Diadaptasi dari (Ferrer Márquez, Gil, & López Maeztu, 2019)



Gambar 6. Kegiatan dialog sosial

Sumber: (AMFORI, 2020; ILO, n.d.)



Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

Tidak ada model dialog sosial yang bersifat “satu untuk semua” yang dapat dengan mudah diadopsi dari satu negara ke negara lain. Menyesuaikan dialog sosial dengan situasi masing-masing tempat adalah kunci untuk memastikan kepemilikan lokal atas proses tersebut. Tabel 2 mencantumkan beberapa pedoman dialog sosial dan praktik terbaik yang dapat digunakan sebagai tolok ukur.

Tata kelola yang baik. Tata kelola dan mekanismenya (misalnya, cara berbagai aktor dan pemangku kepentingan berinteraksi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk merancang dan mengimplementasi rencana transisi) merupakan inti dari transisi yang adil. Pengelolaan dan koordinasi upaya yang efektif, akuntabel, dan transparan sangat penting untuk menjamin keadilan dan partisipasi inklusif dalam proses transisi, meminimalkan dampak negatif, serta melindungi kehidupan dan mata pencaharian kelompok yang paling rentan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Eropa mengembangkan sebuah perangkat untuk “Desain struktur tata kelola dan proses keterlibatan

pemangku kepentingan untuk wilayah batubara dalam proses transisi” (*Design of governance structures and stakeholder engagement processes for coal regions in transition*) yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk merancang mekanisme tata kelola.¹

1.5. Prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip transisi berkeadilan memberikan kerangka kerja untuk mewujudkan konsep transisi yang adil. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Cakupan dan Dimensi, prinsip-prinsip ini menekankan bahwa transisi yang adil tidak hanya berhubungan dengan langkah-langkah kompensasi dan ketenagakerjaan bagi pekerja yang terkena dampak, tetapi juga melihat dimensi yang lebih luas untuk memastikan perlindungan dan pemulihan lingkungan, diversifikasi kegiatan ekonomi, dan juga kesenjangan sosial-ekonomi dan masalah inklusi. Prinsip-prinsip ini harus dijalankan secara paralel, bukan secara selektif (Atteridge & Strambo, 2020).

Tabel 2. Pedoman dialog sosial dan praktik terbaik

Sumber: Penulis.

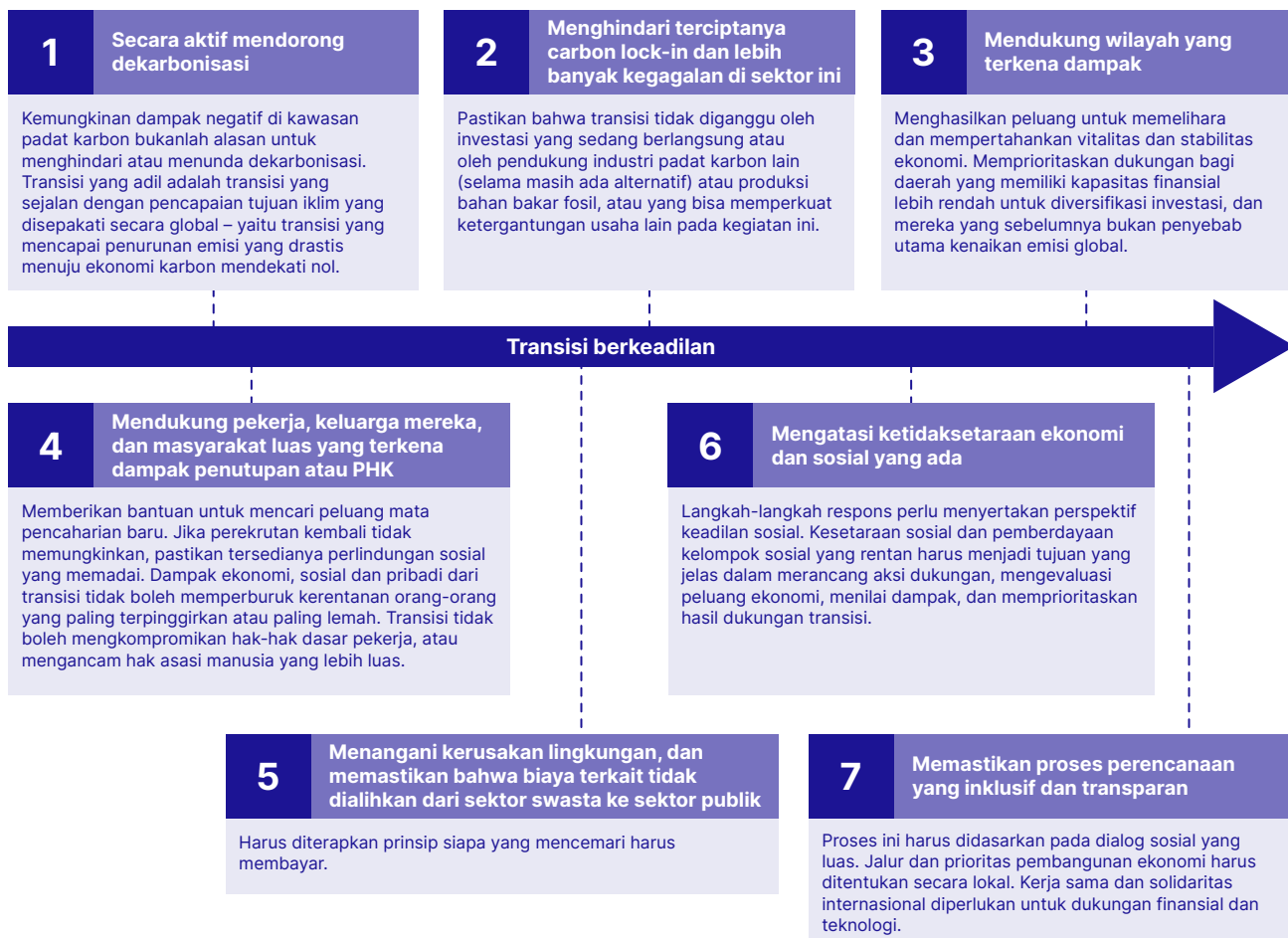
Kerangka/alat/pedoman	Institusi	Keterangan
National Tripartite Social Dialogue: An ILO guide for improved governance	ILO (2013)	Panduan untuk dialog sosial tripartit di tingkat kebijakan yang sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional dan praktik perbandingan yang baik
Social Dialogue Handbook: Step-by-step Guidance	AMFORI (2020)	Panduan pelaksanaan dialog sosial untuk memajukan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender
Social Dialogue: Finding a Common Voice	ILO (n.d.)	Penjelasan tentang dialog sosial, kondisi yang memungkinkan, perbedaan bentuk, dan peran pemangku kepentingan yang berbeda.
Facilitating social dialogue under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises	OECD (2018)	Panduan bagi usaha-usaha untuk memenuhi kondisi sosial dalam operasi dan rantai pasokan mereka.
Achieving Decent Work and Inclusive Growth: the Business Case for Social Dialogue	ILO & OECD (n.d.)	Memberikan 7 wawasan utama tentang dialog sosial beserta studi kasus dari setiap wawasan.

1. *Toolkit* ini dapat diakses pada tautan berikut https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/governance_of_transitions_toolkit_-_platform_for_coal_regions_in_transition.pdf

Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

Gambar 7. Prinsip-prinsip transisi berkeadilan

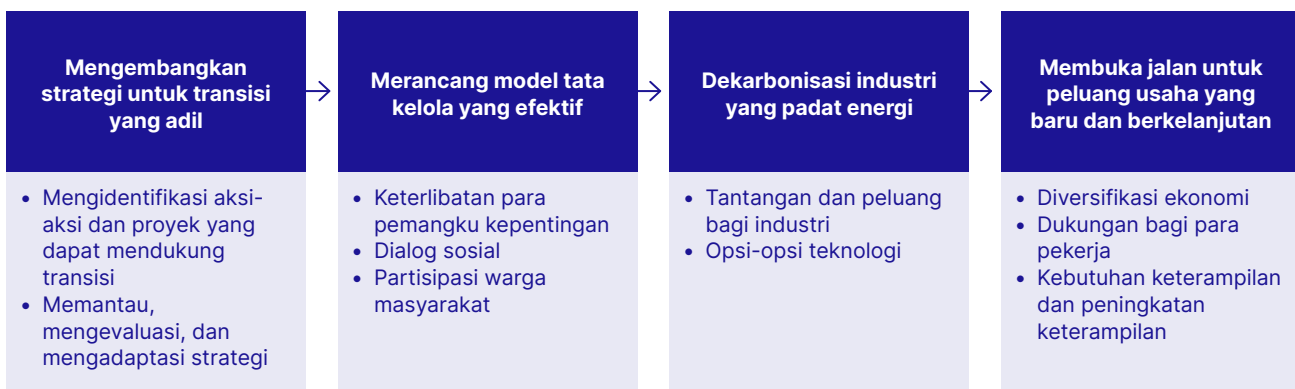
Sumber: (Atteridge & Strambo, 2020)



Berdasarkan konsep, prinsip, dan pilar aksi, transisi yang adil dapat ditempuh melalui proses berikut:

Gambar 8. Proses transisi yang adil

Sumber: diadaptasi dari Wuppertal Institute (2022)



Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

Akses ke informasi (yang andal dan terpercaya).

Akses ke data dan statistik yang terpercaya (misalnya, jumlah pekerja dan jumlah perusahaan di sektor tertentu yang akan terkena dampak rencana transisi) sangat penting untuk mengembangkan peta jalan dan strategi yang efektif untuk transisi yang adil, mengukur kemajuan, dan memberikan informasi tentang efektivitas kebijakan dan program transisi. Hal ini juga akan membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas proses transisi. Karena akses ke data dan informasi yang andal seringkali kurang memadai di negara-negara berkembang, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas data dan

statistik sebagai salah satu prasyarat untuk transisi berkeadilan.

1.6. Perkembangan Terbaru

Beberapa institusi telah mengembangkan kerangka kerja, pedoman, dan inisiatif di berbagai sektor yang berhubungan dengan transisi berkeadilan. Tabel 3 merangkum berbagai kerangka kerja dan inisiatif yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam mengembangkan dan/atau mengintegrasikan transisi berkeadilan ke dalam kebijakan dan program di Indonesia, termasuk untuk investor, perusahaan, dan kaum muda:

Tabel 3. Daftar kerangka kerja, alat, dan pedoman yang ada untuk transisi berkeadilan

Sumber: Penulis.

Kerangka kerja/alat/pedoman	Institusi	Keterangan
Umum, multi-sektor		
ILO's Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All	ILO (2015)	Orientasi praktis yang tidak mengikat kepada Pemerintah, dilengkapi dengan panduan pengguna (2021)
User manual for the ILO's Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All	ILO (2021)	Instruksi dan penjelasan yang lebih terperinci tentang Pedoman ILO untuk Transisi yang Adil tahun 2015.
Just Transition Toolbox	CIF (2022)	Menyorot komponen umum dalam proses perencanaan yang tipikal dan memaparkan informasi sumber daya (alat, metode, dan studi kasus).
EBRD Just Transition Initiative	EBRD	Dukungan untuk wilayah EBRD yang terkena dampak transisi hijau melalui investasi pembiayaan yang tersedia.
EU Just Transition Mechanism	EU	Titik akses tunggal untuk dukungan dan pengetahuan tentang Transisi yang Adil: pendanaan, peraturan, inisiatif
India Just Transition Centre	iForest	Platform baru untuk Transisi yang Adil melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Sektor energi, khususnya pada transisi batubara		
Just Transition Toolbox for Coal Regions	Wuppertal Institute (2022)	Tinjauan tentang pembelajaran dan konsep praktis dalam transisi batubara.
Toolkit: Transition Strategies. How to Design Effective Strategies for Coal Regions in Transition	EU (2020)	Panduan tentang cara mengembangkan strategi transisi di wilayah batubara.
The World Bank's 3x3 Matrix (governance, people and communities, and infrastructure): A Tested Methodology for Coal Transition	World Bank (2021)	Kerangka komprehensif yang mendukung penutupan tambang batu bara yang digunakan untuk studi kasus di Eropa.
IRENA Collaborative Framework on Just and Inclusive Energy Transitions	IRENA	Sedang dalam pengembangan. Prinsip dan modalitas umum yang diadopsi pada Mei 2021.

Bagian 1. Penjelasan tentang Transisi Berkeadilan

Kerangka kerja/alat/pedoman	Institusi	Keterangan
Sektor energi, khususnya pada transisi batubara		
South Africa Just Transition Blueprint for Workers for the Coal-Energy Value Chain, Agriculture, and Transport	COSATU (2022)	Cetak biru ini memberikan kebijakan, perundingan bersama, dan alat-alat lainnya bagi serikat pekerja untuk memastikan agar mereka dapat mendorong agenda transformasi ekonomi yang radikal.
The Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions	IEA	Kementerian ESDM Indonesia adalah salah satu anggotanya.
Indonesia's Country Platform for Energy Transition Mechanism (ETM)	ADB (2022)	Sedang dikembangkan, sebagai bagian dari dukungan ADB untuk Indonesia, Filipina, dan Vietnam.
A Toolkit for a Just Transition with the People	ENGAGER (2021)	Panduan untuk mengatasi ketidakadilan struktural dalam sebuah transisi.
Investor, lembaga keuangan, dan sektor/perusahaan swasta		
Climate Change and the Just Transition: A Guide for Investor Action	Grantham Institute (2018)	Panduan bagi investor dan sektor keuangan untuk menerapkan Transisi yang adil.
Just Transition Finance Tool for banking and investing activities	ILO (2022)	Memberikan panduan praktis kepada lembaga keuangan dalam mengintegrasikan gagasan-gagasan tentang Transisi yang Adil ke dalam strategi dan operasi mereka.
Just Transition: A Business Guide (From the Just Transition Centre and the B Team)	ITUC (2018)	Panduan bagi perusahaan untuk memastikan transisi yang adil di dalam perusahaan tersebut.
Introduction to Just Transition: A Business Brief	UN Global Compact (2022)	Memperkenalkan peran perusahaan dalam mendukung transisi yang adil.
Kelompok marginal		
Youth for a Just Transition: A toolkit for Youth Participation in the Just Transition Fund	EU (2021)	Panduan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam pendanaan transisi yang adil dari UE.
Sektor lain: pertanian, kehutanan, garmen & tekstil		
Just Rural Transition		Inisiatif transisi yang adil dalam adaptasi iklim, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan
A 'Just Transition Toolkit' for textile and garment supply chain in Asia	ILO (2021)	Saran khusus tentang transisi yang adil di sektor garmen kepada mitra sosial dan kelompok pemangku kepentingan industri.

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

2.1. Studi Kasus dari Berbagai Negara di Dunia

Isu transisi berkeadilan makin dikenal dan diminati oleh banyak negara di dunia terutama dalam konteks mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam aksi perubahan iklim untuk mencapai pembangunan rendah karbon yang secara bersamaan juga memastikan terwujudnya pemberantasan kemiskinan dan inklusi sosial. Banyak negara telah mulai menerapkan prinsip transisi berkeadilan sebagai bagian dari kebijakan, strategi dan program mereka dalam intervensi terkait iklim. Inisiatif transisi berkeadilan dapat dimulai oleh pemerintah (**pendekatan top-down**) atau masyarakat (**pendekatan bottom-up**) seperti oleh pekerja yang terkena dampak, organisasi lokal, dan entitas swasta. Studi kasus yang disajikan di bagian ini menunjukkan bagaimana setiap kelompok baik pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, dan aktor non-pemerintah (sektor bisnis atau swasta) dapat berperan dalam menginisiasi proses transisi berkeadilan.

2.1.1. Transisi Berkeadilan yang Dipimpin oleh Pemerintah Nasional

1. Jerman: transisi batu bara di wilayah Ruhr dan Lusatia

JERMAN – Transisi energi (batu bara)

Periode transisi: 1950an - 2018

Lokasi transisi: Seluruh wilayah Jerman, termasuk Ruhr (Barat) dan Lusatia (Timur)

Produksi batu bara: 123 juta ton - Ruhr (1957); 171,2 juta ton - Lusatia (2017)

Pekerja yang terkena dampak: 600.000 jiwa (sejak 1950an)

Kebijakan transisi: dialog sosial, pendanaan, (komisi) satuan kerja, tata kelola multi-level, peningkatan infrastruktur, penghapusan tambang batu bara, dukungan bagi para pekerja

Fitur utama

- Menekankan pentingnya visi yang jelas tentang transisi, keterlibatan & dialog sosial pemangku kepentingan, komitmen kuat dari pemerintah, badan pengelola yang didedikasikan secara khusus (Komisi Batu Bara Jerman), dan mekanisme pendanaan khusus (Pendanaan Transisi Berkeadilan)
- Cakupan: terutama pekerja, tetapi masyarakat lokal juga diperhitungkan (transisi status quo)
- Dimensi: keadilan prosedural dan distributif
- Pelajaran yang didapat: transisi berkepanjangan (ditunda-tunda) secara signifikan meningkatkan biaya dan konsekuensi sosial.

Pada akhir 1950-an, pertambangan batu bara Jerman mengalami krisis yang menyebabkan impor batu bara lebih murah daripada membelinya di dalam negeri, dan pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi lebih populer. Pemerintah membayar selisih harga batu bara domestik yang lebih mahal agar bisnis tambang tetap beroperasi, namun dukungan ini adalah upaya untuk mengatasi penurunan yang terjadi, bukan untuk transisi. Selama 60 tahun berikutnya, jumlah orang yang bekerja di pertambangan batu bara turun dari 600.000 lebih pekerja menjadi sekitar 15.000. Seiring memburuknya krisis iklim, penghentian penggunaan batu bara dicanangkan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi emisi GRK nasional, di mana hal ini menimbulkan ancaman baru bagi wilayah tersebut dan menciptakan gelombang lain perubahan industri.

Untuk mengelola transisi, pemerintah federal meluncurkan Komisi Batu Bara Jerman yang terdiri dari pemerintah federal, pejabat pemerintah daerah, serikat pekerja, dan perwakilan industri. Komisi ini menyelenggarakan dialog untuk membahas visi transisi (seperti apa penghapusan batu bara yang dapat diterima secara sosial) dan kebijakan untuk mendukung pekerja (seperti dukungan keuangan dan logistik, program pelatihan, dan konseling untuk karir). Hasilnya adalah komitmen untuk secara bertahap mengurangi lignit hingga target penghapusannya di tahun 2038 dan menyiapkan Dana Transisi yang Adil senilai €40 miliar yang mencakup wilayah Lusatia.

Contoh dari Jerman menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas untuk transisi, keterlibatan kuat dari pemangku kepentingan dan dialog sosial, koordinasi yang efektif melalui badan kelembagaan (Komisi Batu Bara Jerman), komitmen yang kuat dari pemerintah, dan mekanisme pendanaan khusus (Dana Transisi yang Adil). Meskipun cakupan transisi terutama berfokus pada pekerja, program dukungan untuk masyarakat juga dipertimbangkan. Oleh karena itu, transisi ini lebih masuk dalam kategori transisi status quo.

Kasus ini juga menunjukkan penerapan keadilan prosedural dan distributif melalui partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja yang terkena dampak, dalam dialog untuk merancang mekanisme transisi dan jenis dukungan bagi mereka. Terlepas dari banyak aspek positif yang bisa dipelajari, kasus ini juga menunjukkan bahwa memperpanjang (menunda) transisi batu bara dan merencanakan transisi secara reaktif (bukan

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

proaktif) memiliki konsekuensi finansial dan sosial yang sangat besar. Selain besarnya pendanaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar selisih harga antara batu bara domestik dan impor selama beberapa dekade yang semestinya dapat digunakan untuk keperluan lain, wilayah batu bara di Jerman memiliki kinerja ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, dan seringkali, orang-orang yang tinggal di wilayah ini merasa terasing.

2. Kanada: transisi bahan bakar fosil di Alberta

KANADA – Transisi energi (bahan bakar fosil)

Periode transisi: 2018 - sekarang

Lokasi transisi: di seluruh Kanada, termasuk provinsi Alberta

Produksi batu bara: 25 - 30 juta ton (Alberta)

Pekerja yang terkena dampak: 3100 pekerja di Alberta (2017)

Kebijakan transisi: Komitmen penghapusan batu bara, Satuan Tugas Transisi Berkeadilan, anggaran federal untuk inisiatif transisi, dukungan pelatihan, dan program peningkatan keterampilan, pensiun dini untuk pekerja yang lanjut usia, akses pinjaman untuk mendukung usaha, investasi pada pengembangan dan penyebaran teknologi yang bersih.

Fitur utama

- Menekankan pentingnya dukungan politik, komitmen pemerintah, keterlibatan & dialog sosial pemangku kepentingan, partisipasi warga, badan pengelola dan mekanisme pembiayaan khusus.
- Cakupan: pekerja, masyarakat setempat, usaha/bisnis (rantai nilai) - transisi reformasi manajerial/struktural.
- Dimensi: keadilan prosedural, distributif, dan restoratif

Alberta merupakan sebuah provinsi di Kanada yang kaya akan kombinasi gas alam, batu bara, mineral, minyak konvensional, dan pasir minyak atau pasir tar yang terkenal, yang sempat dijadikan “tambang emas” pada tahun 1970-an karena adanya krisis minyak dunia yang mengakibatkan banyaknya investasi di wilayah tersebut. Pada tahun 2018, Kanada mengumumkan komitmennya untuk secara bertahap menghapuskan listrik berbasis batu bara di tahun 2030 yang dapat membantu mengurangi sekitar 10% dari total emisi CO₂ Kanada. Rencana tersebut didukung oleh pihak konservatif dan

liberal karena mereka menyadari dampak batu bara terhadap lingkungan dan kesehatan, dan bahwa pembangkit listrik berbasis batu bara sudah mengalami penurunan.

Jauh sebelum pengumuman komitmen pemerintah federal, pada tahun 2015, *New Democratic Party* (NDP) di Alberta telah memiliki gagasan ambisius untuk memajukan transisi yang adil dengan mendekarbonisasi sektor batu bara yang sudah menua dan mahal. NDP menerbitkan Rencana Kepemimpinan Iklim untuk menghentikan listrik tenaga batu bara secara bertahap yang mengarah pada pembentukan Koalisi Transisi Batu Bara untuk mewakili suara para pekerja yang terkena dampak. Pemerintah juga menyediakan Dana Transisi Komunitas Batu Bara secara khusus untuk masyarakat dan pekerja batu bara (melalui Program Transisi Tenaga Kerja Batu Bara).

Selain itu, para pekerja di ladang minyak pasir tar Alberta bertekad untuk berperan dalam menciptakan masa depan yang positif bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka mengembangkan pendekatan empat pilar yaitu kolaborasi, visi, pelatihan, dan advokasi untuk mendukung kebijakan transisi. Mereka juga mengembangkan proyek dan program untuk peningkatan keterampilan, dan berupaya memperbaiki, mengalih fungsikan, dan sebisa mungkin memanfaatkan kembali fasilitas penghasil bahan bakar fosil sebagai fasilitas-fasilitas energi hijau. Proses transisi di Alberta menjadi model yang kemudian direplikasi oleh pemerintah pusat karena merupakan salah satu paket kebijakan yang paling komprehensif dalam melaksanakan transisi berkeadilan.

Pada tahun 2018, pemerintah Kanada membentuk sebuah Satuan Tugas untuk Transisi Berkeadilan bagi Pekerja dan Komunitas Batu Bara Kanada untuk membantu memahami kemungkinan dampak transisi batu bara dan memberikan rekomendasi untuk mendukung pekerja dan masyarakat yang terkena dampak. Selanjutnya, pemerintah federal menyiapkan *Canada Coal Transition Initiative* (CCTI) senilai CA\$ 35 juta Kanada dari anggaran federal 2018. Inisiatif ini merupakan dana strategis lima tahun yang akan mendukung pengembangan keterampilan dan diversifikasi ekonomi, untuk membantu para pekerja dan masyarakat dalam beradaptasi dengan energi bersih dan ekonomi hijau. Hal ini bisa dinilai sebagai perluasan kasus transisi energi Alberta ke tingkat nasional.

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

Contoh dari Kanada ini menunjukkan terintegrasinya semua cakupan dan dimensi transisi berkeadilan (keadilan prosedural, distributif, dan restoratif). Transisi tidak hanya ditujukan untuk mendukung pekerja yang terkena dampak, tetapi juga usaha/bisnis dan masyarakat secara lebih luas termasuk kelompok masyarakat adat (*First Nations Canadians*). Terlibatnya pemangku kepentingan dari luar mitra dialog tripartit yang berpartisipasi secara aktif melalui seluruh proses transisi menunjukkan kuatnya dialog sosial dan penerapan keadilan prosedural. Pembelajaran terbesar dari kasus ini adalah pada awalnya pemerintah gagal untuk menyadari bahwa kepentingan dari pengusaha dan pekerja belum tentu sejalan. Menyeimbangkan kebutuhan setiap pemangku kepentingan yang berbeda dan mengatur waktu yang tepat untuk memenuhinya sangatlah penting. Dalam kasus Kanada ditemukan bahwa begitu perusahaan menerima pembayaran dari pemerintah, serikat pekerja dan para pekerjanya kehilangan pengaruh mereka dalam negosiasi atau perencanaan.

2.1.2. Transisi Berkeadilan yang Dipimpin oleh Pemerintah Daerah

3. Swedia & AS: transisi regenerasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan

SWEDIA & AS – Transisi dari industri berat ke ekonomi berbasis pengetahuan

Periode transisi: 1970an

Lokasi transisi: Gothenburg dan Pittsburgh

Pekerja yang terkena dampak: 45.000 jiwa (Gothenburg), 133.000 – 200.000 (Pittsburgh)

Kebijakan transisi: regenerasi situs galangan kapal, perlindungan sosial (Gothenburg); bergeser menuju ekonomi berbasis pengetahuan (keduanya)

Fitur utama

- Kepemimpinan lokal dan keterlibatan semua pihak dalam mengelola aset dan jaringan yang ada.
- Cakupan: pekerja dan masyarakat lokal (Gothenburg) - transisi reformasi struktural; pekerja (Pittsburgh) - transisi status quo
- Dimensi: keadilan prosedural dan restoratif (Gothenburg); keadilan restoratif (Pittsburgh).

Kota Gothenburg memiliki galangan kapal terbesar di dunia pada tahun 1930-an. Pada tahun 1970an, galangan kapal tersebut mengalami kehancuran, di mana sekitar 45.000 orang kehilangan pekerjaan.

Kota ini kemudian memilih pendekatan *top-down* untuk mengatasi kerugian, di mana negara dan Kota Gothenburg bergerak untuk membeli situs galangan kapal yang sudah ditinggalkan tersebut, serta berencana untuk meregenerasinya. Para pekerja galangan kapal mendapatkan pekerjaan baru di industri mobil yang masih kuat. Jaringan pengaman sosial yang kuat juga membantu memfasilitasi transisi bagi para pekerja. Situs yang dibeli tersebut secara bertahap dibangun dan digunakan kembali sebagai cabang Universitas Teknologi Chalmers. Secara bertahap, identitas kota pun bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan yang menarik beberapa perusahaan teknologi. Selain itu, galangan kapal telah diregenerasi menjadi tata ruang perkotaan yang layak huni dengan area yang diperuntukkan bagi apartemen dan taman serta lokasi perkantoran. Transisi tersebut sangat diarahkan oleh pemerintah kota (lokal) dan dibangun berdasarkan konsensus dari seluruh partai politik.

Di belahan bumi lain, Kota Baja Pittsburgh menghadapi keruntuhan yang menyebabkan hilangnya sekitar 133.000 mata pencaharian di kota tersebut dan lebih dari 200.000 pekerjaan secara regional. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya migrasi hingga sepertiga dari populasinya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menjadikan kota ini terlilit krisis utang. Tanpa sistem pengaman sosial, kota ini mengalami transisi yang kurang mulus. Tanpa bantuan dari pemerintah federal, yayasan filantropi berbasis lokal dan kepemimpinan dari universitas turun tangan bersama pemerintah lokal untuk memitigasi kerusakan akibat keruntuhan bisnis tersebut. Kota ini diubah menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dengan berinvestasi di universitas dan pusat medis, seperti *University of Pennsylvania* dan *Carnegie Mellon*. Transisi ini dilihat sebagai proses kolaborasi bertahap di antara pemangku kepentingan yang berbeda, bukan sebagai upaya yang terencana dan terpusat. Penekanan juga diberikan pada peningkatan kondisi lingkungan kota, seperti peningkatan kondisi sungai dan area rekreasi menggantikan tata ruang industri.

Kedua kasus tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan lokal dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengelola aset dan jaringan yang ada. Mereka juga menunjukkan dimensi keadilan restoratif karena kedua kota tersebut menekankan perbaikan kondisi lingkungan setelah runtuhnya industri berat. Kasus Swedia menunjukkan keadilan prosedural yang lebih kuat yang berasal dari

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

keterlibatan pemangku kepentingan dan dialog sosial yang lebih baik dibandingkan dengan Pittsburgh di mana keterlibatan dengan masyarakat umum tidak menjadi pertimbangan utama. Mempertahankan pekerjaan dan membangun industri baru menjadi fokus utama kepemimpinan lokal. Di Gothenburg, ruang lingkup transisi mencakup pekerja dan masyarakat setempat yang terkena dampak, sementara pendekatan di Pittsburgh malah menciptakan atau memperdalam kesenjangan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan rasial.

4. Australia: transisi penghentian batu bara.

AUSTRALIA – Sektor energi (batu bara)

Periode transisi: 2016 hingga sekarang

Lokasi transisi: Latrobe Valley, Victoria

Produksi batu bara: 57,8 juta ton (2013-2014)

Pekerja yang terkena dampak: 750 jiwa (2016)

Kebijakan transisi: pelatihan ulang, bantuan keuangan bagi pekerja yang terkena dampak, skema transfer pekerja, pembentukan satuan tugas, kawasan ekonomi khusus

Fitur utama

- Menunjukkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan dialog sosial, badan pengelola khusus dan mekanisme pembiayaan, serta komitmen dari pemerintah.
- Cakupan: pekerja, masyarakat, pengusaha, dan rantai nilai
- Dimensi: keadilan prosedural, distributif dan restoratif

Meskipun batu bara mendominasi konsumsi energi primernya, Australia telah menutup beberapa pembangkit listrik tenaga batu baranya dalam dekade terakhir dan berencana menyalurkan sebagian besar pasokan listrik nasionalnya dari sumber energi terbarukan. Negara menyiapkan berbagai insentif melalui Target Energi Terbarukan Skala Besar dan Skema Energi Terbarukan Skala Kecil. Rencana ini awalnya mendapat pertentangan dari para pekerja batu bara, serikat pekerja, dan masyarakat. Pada tahun 2016, ENGIE berencana menutup tambang dan pembangkit listrik Hazelwood di Latrobe Valley, Victoria sebagai bagian dari rencana perusahaan tersebut untuk beralih ke energi terbarukan.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Victoria mendirikan *Latrobe Valley Authority* untuk mendorong transisi yang adil. Upaya ini didasarkan pada pendekatan *bottom-up*, dengan menjalin kemitraan

berbasis lokal melalui pendanaan yang fleksibel dan perjanjian operasional dengan struktur-struktur yang sudah ada, seperti serikat pekerja dan lembaga pelatihan. *Latrobe Valley Authority* membentuk Zona Pertumbuhan Ekonomi dengan insentif ekonomi (yaitu, penggantian pungutan pemerintah untuk usaha), skema kembali bekerja dengan bayaran untuk mempekerjakan orang yang menganggur, dan insentif untuk menarik investasi baru. Dua dana khusus disiapkan untuk memberikan dukungan bagi usaha dan pekerjaan di sepanjang rantai nilai yang terkena dampak penutupan tambang.

Kasus ini menampilkan dimensi keadilan prosedural dan distributif di mana keterlibatan dan dialog sosial yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan dilakukan untuk merancang dan mengimplementasikan transisi yang mendukung pekerja, masyarakat, dan juga usaha, serta pekerjaan yang terkena dampak di sepanjang rantai pasok. Kerangka kelembagaan dan mekanisme keuangan yang kuat juga merupakan komponen utama dalam kasus Australia. Melalui inisiatif yang dikelola oleh *Latrobe Valley Authority*, sebanyak 962 pekerjaan diciptakan dari 29 jenis usaha, 852 orang dilatih kembali dan dipekerjakan melalui skema transfer pekerja, dan 86 proyek bisnis menerima penggantian pungutan dan tagihan pemerintah pada 2019. Kasus ini juga menyorot penerapan keadilan restoratif melalui peningkatan fasilitas dan layanan untuk produksi dan konsumsi energi. Ada 136 proyek masyarakat yang didanai untuk meningkatkan fasilitas dan menyelenggarakan acara, sebanyak 1.430 pekerja dan keluarga didukung melalui layanan dan saran terkait transisi, serta lebih dari 1000 rumah dilengkapi dengan peningkatan alat-alat yang efisien energi maupun bertenaga surya.

2.1.3. Transisi Berkeadilan yang Dipimpin oleh Investor, Serikat Pekerja, Usaha, dan Masyarakat

5. Peran investor

Shareholder Association for Research and Education (SHARE), atas nama institusi klien investornya, mendatangi empat perusahaan utilitas yang berencana menutup fasilitas pembangkit berbahan bakar batu bara mereka di Amerika Utara untuk menanyakan strategi perusahaan terkait transisi yang adil. SHARE meminta perusahaan tersebut untuk membahas potensi langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari penutupan pabrik. Selain itu, perusahaan tersebut diharapkan dapat melakukan dialog sosial dengan perwakilan pekerja, pemerintah daerah, masyarakat

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses pelibatan tersebut dimulai dengan penelitian tentang rencana transisi, dilanjutkan dengan konsultasi dengan serikat pekerja dan pejabat perusahaan untuk menilai potensi dampak ekonomi terhadap pekerja dan masyarakat setempat serta investasi alternatif. Beberapa faktor utama yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah (i) kesempatan kerja yang baru dan/atau preferensi perekrutan di fasilitas atau operasi baru yang dikembangkan perusahaan di wilayah tersebut, (ii) pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan terkait, (iii) advokasi dengan pemerintah daerah, (iv) kesepakatan tentang manfaat bagi masyarakat, dan (v) pendanaan transisi yang sesuai.

Investor dapat memainkan peran yang kuat dalam menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan perusahaan dalam transisi yang adil dan dalam mendorong praktik yang lebih baik. Melalui posisinya sebagai pemilik aset dan manajer, investor dapat membantu membentuk sikap dan perilaku dewan direksi. Di sini, transisi yang adil memberikan cara yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan pentingnya pendekatan terpadu terkait faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola.

USA: terlibat dengan perusahaan utilitas di Amerika Utara

Periode transisi: 2018 - sekarang

Lokasi transisi: Amerika Utara

Inisiatif transisi: keterlibatan perusahaan dengan investor untuk merencanakan transisi yang adil

Fitur utama

- Menggarisbawahi pentingnya keterlibatan perusahaan untuk meningkatkan investasi demi transisi yang adil dan mendorong praktik yang lebih baik
- Cakupan: pekerja dan masyarakat
- Dimensi: keadilan prosedural dan distributif

6. Jerman: transisi yang dipimpin serikat buruh di Schweinfurt

Sebuah kota tua industri di Jerman, yaitu Schweinfurt, berpenduduk sekitar 50.000 jiwa dan memiliki industri otomotif yang kuat. Kota ini menghadapi tantangan dekarbonisasi yang dapat membawa perubahan struktural yang mempengaruhi kehidupan dan kondisi kerjanya. Dalam merespons tantangan tersebut, pada tahun 2016, dua serikat pekerja, yaitu serikat pekerja logam *Bavaria (IG*

Metall) dan *Friends of the Earth* di Bavaria (BUND), berkolaborasi dan mengorganisir sebuah proyek untuk membuat kebijakan industri sosial dan ekologi di wilayah sekitar Schweinfurt.

Jerman – Industri Otomotif Schweinfurt

Periode transisi: 2016

Lokasi transisi: Schweinfurt

Penduduk: 50.000 jiwa

Inisiatif transisi: Penyediaan opsi mobilitas regional dan inisiatif di tingkat masyarakat untuk membuat kebijakan industri sosial dan ekologis

Fitur utama

- Menunjukkan peran penting kelompok masyarakat dalam mempengaruhi terciptanya kebijakan industri sosial dan ekologi untuk mencapai Transisi Berkeadilan di wilayah tersebut
- Cakupan: pekerja dan masyarakat
- Dimensi: keadilan prosedural, distributif dan restoratif

Proyek ini bertujuan untuk mendukung pengembangan konsep mobilitas regional yang baru dan menghasilkan pilihan mobilitas yang ramah iklim. Selain itu, serikat buruh mengorganisir “hari mobilitas” di Schweinfurt bersama perusahaan utilitas lokal, dewan perusahaan otomotif lokal, dan manajemen perusahaan untuk memperkenalkan dan mendorong para pekerja menggunakan transportasi umum dan mengembangkan upaya perbaikan transportasi umum melalui dialog sosial.

Meskipun inisiatif tersebut masih dalam proses, contoh kasus ini menunjukkan kepemimpinan serikat pekerja yang secara proaktif merancang transisi yang adil, dengan memperhitungkan kebutuhan pekerja dan masyarakat setempat yang terkena dampak. Kasus ini menunjukkan dimensi keadilan prosedural yang kuat dari transisi yang adil melalui partisipasi aktif dari serikat pekerja dan masyarakat. Proyek transisi yang dipimpin oleh masyarakat ini kemungkinan akan menciptakan dampak yang jauh lebih besar dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terlaksana jika ada dukungan dan intervensi dari pemerintah daerah.

2.1.4. Studi Kasus Lainnya

Semakin berkembangnya publikasi tentang transisi berkeadilan dapat memberikan contoh yang berguna untuk dipelajari. Sebagian besar dari publikasi ini mengeksplorasi transisi di sektor energi, khususnya

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

batu bara; namun, terdapat juga beberapa contoh transisi di sektor lain seperti industri dan pertanian. Sebagian besar studi kasus yang terdokumentasi terjadi di *Global North*, meskipun tersedia juga beberapa contoh yang berasal dari *Global South*. Dengan perkembangan positif yang terjadi belakangan ini terkait transisi berkeadilan di negara-negara berkembang, diharapkan ada lebih banyak publikasi tentang kasus-kasus transisi yang adil di *Global South*. Lampiran 1 memberikan beberapa referensi lebih lanjut yang menggabungkan informasi tentang transisi yang terjadi di masa lalu sebagai literatur lanjutan.

2.2. Transisi Berkeadilan dalam Konteks Indonesia

Bagian ini membahas beberapa poin utama dan perkembangan terbaru tentang perjalanan Indonesia menuju realisasi transisi yang adil, termasuk kerangka kebijakan dan peraturan yang relevan serta beberapa inisiatif dan dukungan dari donor, lembaga penelitian, dan NGO.

2.2.1. Dokumen Kebijakan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Deklarasi Silesia 2018 yang menandakan komitmen Indonesia terhadap transisi yang adil dan setara. Meskipun masih terbatas, **beberapa dokumen kebijakan telah membahas prinsip-prinsip transisi yang adil**. Dalam NDC 2021 yang Diperbarui, pemerintah mengungkap empat komponen penting dari transisi, sementara dokumen LTS-LCCR menyajikan rencana intervensi untuk mengatasi isu-isu terkait transisi berkeadilan. Prinsip-prinsip transisi berkeadilan diidentifikasi sebagai pendekatan lintas sektoral dalam kedua dokumen ini, yang diterapkan pada semua sektor prioritas untuk mitigasi dan adaptasi.

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Deklarasi Bogor pada tahun 2019 yang merupakan sebuah komitmen tripartit untuk menangani perubahan iklim dan mengawali transisi berkeadilan. Perwakilan dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja menekankan pentingnya mempertimbangkan hak-hak pekerja dalam aksi iklim, dan menyepakati empat poin utama: penerapan prinsip-prinsip untuk pekerjaan yang layak dan usaha/bisnis yang berkelanjutan; memprioritaskan skema Transisi Berkeadilan dalam kebijakan mitigasi dan adaptasi; peningkatan akses ke berbagai sumber pendanaan untuk perlindungan lingkungan dengan fokus pada tripartisme; dan penerapan unsur Tenaga

Kerja Tripartit dalam berbagai diskusi kegiatan terkait perubahan iklim.

Kotak 2. Transisi Berkeadilan dalam dokumen kebijakan Indonesia

NDC yang Diperbarui, 2021:

“Program dan kegiatan peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim adalah beberapa pendekatan untuk menangani isu-isu seputar transisi berkeadilan dan pekerjaan yang layak dalam mitigasi dan adaptasi, termasuk kebutuhan terkait gender dan antar-generasi serta kebutuhan kelompok rentan.” (hal. 19).

Strategi Jangka Panjang –Rendah Karbon & Ketangguhan Iklim (LTS-LCCR), 2021:

“Isu-isu transisi berkeadilan akan ditangani secara sinergis dengan transisi yang sedang berlangsung dalam prioritas pembangunan pemerintah.” (hal. 16).

Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDIs), 2021”

“... kebijakan dan investasi yang ditargetkan sangat penting untuk mendukung transisi berkeadilan dan memastikan tidak meninggalkan satu orang pun”. ... “Sebagian dari pendapatan tersebut akan dibutuhkan untuk program perlindungan sosial dan investasi lain untuk memastikan transisi berkeadilan...” (hal. 47 dan 53).

2.2.2. Perkembangan Terbaru

Memahami dan mengimplementasi transisi berkeadilan

- Transisi berkeadilan menjadi semakin populer di tahun 2022. Hal ini merupakan sebuah perkembangan positif dari beberapa tahun yang lalu, ketika masih sedikit pembuat kebijakan yang mengetahuinya. Dengan Indonesia menjabat sebagai ketua G20 pada tahun 2022, forum kebijakan utama saat ini difokuskan untuk mencapai transisi yang inklusif dan berkeadilan dengan penekanan khusus pada sektor energi. Banyak organisasi pemerintah dan non-pemerintah, serta sektor swasta, telah didorong oleh presidensi G20 Indonesia untuk meluncurkan inisiatif baru dan menyelaraskan aksi dan program strategis mereka dengan agenda transisi.²
- Transisi yang berkeadilan di Indonesia **secara bertahap beralih dari mengamankan komitmen internasional ke arah desain dan perencanaan transisi**, termasuk menetapkan kondisi-kondisi pendukung. Namun, sebagian besar pemangku kepentingan menyebutnya sebagai **“transisi energi yang berkeadilan”, secara eksklusif dalam konteks sektor energi**. Sektor-sektor lain belum secara formal mengadopsi transisi berkeadilan dalam pendekatan mereka untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meskipun sebenarnya dapat diterapkan secara luas. Bercermin pada perkembangan positif di sektor energi, transisi

2. Beberapa perusahaan seperti BUMN listrik dan BUMN tambang batu bara sudah mulai membentuk unit baru untuk mempersiapkan transisi energi seperti divisi energi terbarukan atau diversifikasi produk.

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

berkeadilan perlu diintegrasikan ke dalam sektor prioritas lainnya di bawah NDC.³

- Transisi yang nyata di sektor energi sendiri belum terjadi, namun diproyeksikan akan terjadi di beberapa tahun mendatang. **Transisi berkeadilan masih menjadi isu pokok dalam diskusi dan perencanaan di tingkat nasional.** Meskipun ada peningkatan pemahaman tentang transisi yang berkeadilan di tingkat sub-nasional (provinsi dan kabupaten), perencanaan untuk transisi (misalnya, identifikasi pendapatan alternatif untuk pemerintah daerah, kegiatan ekonomi baru untuk masyarakat sekitar dan pekerja yang mungkin terkena dampak, potensi program untuk mendukung masyarakat dan pekerja yang terkena dampak selama proses transisi, dll.) masih sangat terbatas, dan urgensi untuk transisi masih belum begitu terlihat.

Inisiatif dan pengembangan terbaru

- **Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim** menekankan pentingnya pengarus-utamaan masalah iklim ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, dan menekankan peran vital kementerian keuangan dalam mengatasi krisis iklim. Di dalam Kementerian Keuangan, istilah “transisi yang berkeadilan dan terjangkau” umum digunakan sekarang ini, terutama saat membicarakan tema keadilan antar negara (antara Global North dan Global South).
- **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bergabung dengan Global Commission IEA terkait People-Centred Clean Energy Transitions** pada tahun 2021. Komisi ini mengkaji masalah keterjangkauan energi dan keadilan serta dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi bersih terhadap manusia dan masyarakat.
- **Untuk membuat Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism atau ETM), pemerintah Indonesia bermitra dengan Asian Development Bank pada COP 26.** Inisiatif ini dengan cepat berkembang menjadi platform pengembangan transisi berkeadilan Indonesia dalam waktu satu tahun. Country Platform ETM Indonesia (ETM-CP) diluncurkan pada tahun 2022 bersamaan dengan presidensi G20 negara ini. ETM-CP dirancang agar berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memobilisasi berbagai jenis pendanaan yang

memungkinkan peningkatan infrastruktur energi dan mempercepat transisi energi bersih ke emisi nol bersih dengan cara yang adil dan terjangkau.

- Selain ETM-CP, **pada KTT G20 November 2022 juga diumumkan Just Energy Transition Partnership (JETP) antara Indonesia dan negara-negara G7.** Untuk mendukung pencapaian target iklim dan energi yang ambisius di masa depan, tujuan keseluruhan kemitraan ini adalah untuk memobilisasi pembiayaan awal di sektor publik dan swasta sebesar USD 20 miliar selama periode tiga hingga lima tahun dengan menggunakan kombinasi hibah, pinjaman lunak, suku bunga pasar, pinjaman, jaminan, dan investasi swasta (Dlouhy and Sink, 2022; Jong, 2022; European Commission, 2022). Peluncuran JETP Indonesia dibangun di atas momentum yang diciptakan oleh JETP lainnya pada COP27 di Mesir, termasuk kemajuan JETP Afrika Selatan dan janji untuk memulai JETP baru dengan Vietnam.

Kerangka kerja dan sistem manajemen

- NDC Indonesia yang diperbarui tahun 2021 dan LTS-LCCR 2050 mengidentifikasi prinsip-prinsip transisi yang adil sebagai pendekatan lintas sektor, berlaku bagi semua sektor prioritas untuk mitigasi dan adaptasi. Namun demikian, **saat ini belum ada kerangka kelembagaan atau keuangan untuk transisi berkeadilan secara menyeluruh (lintas sektoral).** Mengingat perkembangan terakhir di sektor energi, di mana pemerintah berupaya membangun kerangka kerja untuk transisi energi berkeadilan, **maka pendekatan transisi berkeadilan kemungkinan berbasis-sektor, bukan perubahan ekonomi secara menyeluruh.** Namun, hal ini tidak mengesampingkan gagasan bahwa Indonesia dapat menciptakan komisi transisi berkeadilan untuk mencapai transformasi ekonomi yang menyeluruh, serupa dengan yang dilakukan Afrika Selatan.⁴
- Untuk merencanakan transisi berkeadilan, **data yang andal harus tersedia dan dapat diakses.** Hal tersebut masih kurang tersedia pada saat ini. Perencanaan transisi berkeadilan kecil kemungkinan keberhasilannya tanpa data yang akurat. Saat ini, tidak ada satu entitas pun yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang jumlah pekerja yang akan terpengaruh

3. NDC Indonesia mengidentifikasi lima sektor prioritas untuk mitigasi, yaitu energi, kehutanan dan penggunaan lahan, pertanian, limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU).

4. Sebagai perbandingan, di Afrika Selatan, pemerintah telah menyiapkan kerangka kerja berkeadilan yang antara lain menetapkan prinsip-prinsip panduan, dan aksi-aksi kebijakan kunci. Selanjutnya, strategi transisi berbasis sektor juga dikembangkan, meski saat ini masih terbatas pada sektor energi.

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

oleh transisi batu bara/energi. Misalnya, berbagai organisasi yang mencatat jumlah karyawan batu bara melaporkan jumlah yang bervariasi. Selain itu, karena beberapa institusi mengandalkan pelaporan sukarela oleh perusahaan, kredibilitas statistik ini dipertanyakan. Demikian juga, mendapatkan akses data bukanlah proses yang mudah karena proses pengajuannya cukup sulit, dan waktu penyelesaiannya lama.

- Masih perlu untuk mengembangkan **indikator mekanisme pemantauan, pelaporan dan verifikasi (monitoring, reporting, and verification atau MRV) untuk transisi yang berkeadilan di Indonesia.**

Indikator kemajuan transisi berkeadilan idealnya melampaui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi regional bersih. Berbagai indikator dari beberapa bidang isu mungkin perlu ditetapkan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian transisi berkeadilan karena sifat transisi yang saling silang. Menurut Atteridge dan Strambo (2020), indikator harus fokus pada jenis pekerjaan yang diciptakan, siapa yang memiliki akses ke pekerjaan tersebut, dan tingkat inovasi dan ketangguhan masyarakat luas.

Koordinasi antar pemangku kepentingan

- Banyak aktor, termasuk donor, masih memandang **rotasi staf dan kurangnya koordinasi lintas lembaga pemerintah dan divisi-divisi dalam lembaga sebagai salah satu hambatan utama dalam mengembangkan strategi transisi berkeadilan yang sukses.** Untuk mendorong terciptanya sinergi, diperlukan entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas para pekerja, ekonomi informal, perempuan, dan kelompok marginal—seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif—untuk lebih terlibat secara signifikan dalam pengembangan rencana transisi yang berkeadilan di Indonesia.
- **Program Kementerian Ketenagakerjaan saat ini, seperti Program Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial (BPJS) dan Program Triple Skilling (skilling, up-skilling, dan re-skilling), dapat digunakan untuk mendukung berbagai rencana aksi transisi berkeadilan di Indonesia, termasuk di sektor energi, dengan peningkatan koordinasi antar-**

kementerian. Pekerja dan masyarakat yang terkena dampak dapat memperoleh manfaat dari program pelatihan kejuruan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK di Indonesia, yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan baru dan beralih ke pasar kerja yang berbeda. Efisiensi program akan ditingkatkan dengan kerja sama sektor swasta di mana pekerja diproyeksikan untuk mencari pekerjaan baru.

Perhatian pada keadilan antar generasi

- Yang juga perlu diperhatikan, transisi berkeadilan harus mempertimbangkan calon tenaga kerja (generasi saat ini yang masih duduk di bangku sekolah dan akan memasuki pasar tenaga kerja yang akan datang). Oleh karena itu, **penyesuaian terhadap kurikulum pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan saat ini sangat penting dilakukan untuk menjamin agar generasi mendatang memiliki pekerjaan yang layak dan sesuai dengan tren pasar tenaga kerja di masa depan.** Universitas dan sekolah menengah kejuruan harus mulai menyediakan lebih banyak kursus misalnya tentang energi bersih dan terbarukan, dan melatih anggota fakultas mereka untuk mengajarkan mata pelajaran ini.⁵

Serikat buruh

- **Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, atau KSBSI, aktif mendorong transisi yang berkeadilan.** KSBSI dan sepuluh konfederasi afiliasinya mengajukan petisi kepada pemerintah pada tahun 2021 melalui Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meminta pembentukan komite transisi berkeadilan tripartit atau tripartit-plus dengan setidaknya perwakilan dari pemerintah, industri, dan serikat pekerja; pembentukan unit khusus di Kementerian Ketenagakerjaan untuk masalah transisi berkeadilan; dan peran aktif Kementerian dalam mempromosikan dialog bipartit di tempat kerja untuk mengurangi perselisihan antar buruh.

2.2.3. Pembiayaan Transisi Berkeadilan di Indonesia

- Untuk memastikan bahwa transisi yang direncanakan bersifat adil, setara, dan inklusif, banyak pemangku kepentingan telah menekankan pentingnya menangani aspek sosial selain faktor lingkungan dan ekonomi. Dibandingkan dengan

5. Saat ini, masih sangat sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program energi terbarukan atau energi bersih. Program di industri ekstraktif seperti pertambangan dan perminyakan (migas) yang jauh lebih mapan masih cukup populer.

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

hal-hal terkait teknis dan pasar dari transisi, seperti pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk energi baru dan terbarukan, **identifikasi kebutuhan pembiayaan untuk komponen sosial dari transisi berkeadilan biasanya masih belum begitu diformulasikan dengan baik.**⁶

- Karena peralihan dari batu bara ke energi bersih dinyatakan sebagai prioritas nasional, sektor energi juga menerima sebagian besar dukungan donor (misalnya, Mekanisme Transisi Energi yang didukung oleh Asian Development Bank untuk penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap, *Just Energy Transition Partnership* atau JETP dari IPG negara-negara G-7 dan anggota GFANZ, dan Coal Asia Platform dari Bank Dunia). **Platform negara Indonesia untuk Mekanisme Transisi Energi (ETM-CP) yang baru dibentuk adalah prakarsa terkemuka untuk membiayai transisi berkeadilan di negara ini** (Lihat Lampiran 2).
- Indonesia diperkirakan akan membelanjakan **USD 4.195 juta di bawah Program Percepatan Transisi Batu Bara (Accelerating Coal Transition atau ACT) Climate Investment Funds (CIF)**, yang dibangun di atas tiga pilar yaitu: tata kelola, manusia dan masyarakat, dan infrastruktur, untuk transisi energi berkeadilan, dengan fokus pada penutupan dan penggunaan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara.⁷
- **Badan koordinasi formal yang berdedikasi (seperti komisi transisi berkeadilan) diperlukan untuk mengoordinasikan dan mencatat semua dukungan dari aktor pemerintah dan non-pemerintah**, mengingat meningkatnya antusiasme dari berbagai aktor, termasuk donor dan investor, untuk berkontribusi menuju proses transisi yang berkeadilan di bidang energi. Entitas ini, yang akan berfungsi sebagai titik kontak bagi semua mitra yang bersedia mendukung rencana transisi energi berkeadilan, dapat dimasukkan ke dalam *ETM Country Platform*. Untuk mengurangi tumpang tindih atau duplikasi upaya dan untuk mengoptimalkan sinergi di antara berbagai inisiatif, badan ini juga harus memetakan (misalnya membuat basis data) semua mitra beserta kegiatan mereka (baik rencana saat ini maupun yang akan

datang).

- Saat ini banyak donor yang masih merencanakan dukungan mereka untuk agenda transisi energi Indonesia yang berkeadilan. Agar badan koordinasi dapat berkomunikasi secara efektif dan menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, termasuk donor dan mitra pembangunan, akan bermanfaat jika memiliki rencana komunikasi yang jelas. Rencana tersebut harus menguraikan kegiatan-kegiatan spesifik (yang membahas berbagai komponen sosial ekonomi dan lingkungan dari transisi), jadwal pelaksanaan, adanya kesenjangan pendanaan atau kapasitas, dan jenis dukungan yang diperlukan dari calon donor dan mitra.
- **Donor harus fokus pada bidang-bidang berikut** untuk mendukung agenda transisi berkeadilan di Indonesia:
 - Memberikan dukungan teknis untuk mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja nasional dan badan pengelola untuk transisi berkeadilan (misalnya di bawah *ETM country platform* atau komisi transisi berkeadilan)
 - Membuat database yang dapat diakses, khususnya untuk mendokumentasikan pekerja yang mungkin terkena dampak transisi (pekerja langsung, tidak langsung, saat ini, dan masa depan berdasarkan sektor dan sub-sektor)
 - Menyediakan bantuan teknis yang disesuaikan dan terfokus bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memetakan dan mengidentifikasi kegiatan ekonomi baru, sumber pendapatan alternatif, dan jalan dukungan bagi masyarakat dan pekerja selama masa transisi.
 - Membangun kapasitas pemangku kepentingan utama (lokal dan nasional), misalnya melalui berbagi pengetahuan dan kursus singkat (domestik dan internasional).
 - Bantuan dalam menyesuaikan program pendidikan untuk generasi mendatang melalui kerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi teknik, khususnya pada mata pelajaran baru (sektor yang akan ditransisikan), seperti energi terbarukan/bersih.

2.2.4. Relevansi Sektoral

Unsur-unsur transisi berkeadilan telah diperhitungkan, meskipun secara tersirat, di dalam

6. Misalnya, pemerintah Indonesia memperkirakan biaya untuk mencapai target NDC sebesar USD 365 miliar untuk mengurangi 29% emisi karbon pada tahun 2030, atau USD 479 miliar untuk pengurangan emisi karbon sebesar 41% pada tahun 2030 (BBC, 2021; Green Growth, 2021). Anggaran pemerintah hanya akan mencakup 35% dari perkiraan total biaya dan berencana untuk menutup kesenjangan pembiayaan melalui berbagai mekanisme, khususnya melalui partisipasi sektor swasta.

7. Usulan rencana investasi untuk transisi energi yang adil berfokus pada penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia secara bertahap dan pengembangan energi terbarukan tersedia di https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/CIF-INDONE-SIA_ACT_IP-Proposal.pdf

Bagian 2. Studi Kasus dan Konteks Indonesia

tata ruang kebijakan sektoral. Upaya mitigasi di bidang energi selama ini difokuskan pada percepatan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi, namun detail tentang program ketenagakerjaan masih terbatas. Di sektor kehutanan, berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat telah dilaksanakan,

namun demikian, belum secara khusus membahas unsur-unsur transisi berkeadilan. Tabel 4 menyajikan beberapa unsur kebijakan, program, dan regulasi sektoral yang telah mempertimbangkan inklusi dan kesetaraan sosial, yang dapat diperbaiki untuk memastikan transisi berkeadilan di Indonesia.

Tabel 4. Kebijakan, program, dan regulasi dengan pertimbangan inklusi dan kesetaraan sosial

Sumber: Penulis

Sektor	Unsur-unsur yang mempertimbangkan inklusi dan kesetaraan sosial
Energi	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Energi Nasional secara tersirat membahas Transisi Berkeadilan di dalam Keadilan (Pasal 1), ketenagakerjaan (Pasal 6.h & Pasal 7), dampak sosial, dan keselamatan pekerja (Pasal 19).• Distribusi sumber listrik, seperti panel surya ke masyarakat setempat bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sumber energi bersih.• Program sertifikasi keterampilan auditor energi dan manajemen energi (transisi keterampilan tenaga kerja).• Persyaratan muatan lokal dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan• Keputusan Menteri tentang pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat baik selama penambangan maupun pasca penambangan.
Kehutanan dan Tata Guna Lahan	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa program melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan seperti Program Kampung Iklim, Hutan Desa, Masyarakat Peduli Api, dan Desa Peduli Gambut.• Program REDD+ dan PES melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat adat.• Persyaratan SDM pada Instruksi Presiden (3/2020) untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.• Berbagai organisasi seperti Manggala Agni dan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terkait pengendalian kebakaran hutan, termasuk program pemberdayaan dan kemitraan.
IPPU	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri hijau, misalnya UU No 3/2014, menetapkan persyaratan untuk industri hijau.• Penyediaan insentif fiskal (misalnya pajak) dan non-fiskal (misalnya penghargaan) untuk mempromosikan industri hijau, mendorong terciptanya lebih banyak kesempatan kerja.• Persyaratan muatan lokal/domestik, diatur oleh UU No 3/2014 tentang Perindustrian (dan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah No 29/2018 dan Peraturan Menteri Perindustrian No 54/2012 dan 05/2017• One Village One Product untuk memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat, memberdayakan kearifan lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah.
Sampah	<ul style="list-style-type: none">• Program Bank Sampah dengan partisipasi masyarakat dan potensi sumber pendapatan masyarakat• Kerja kolaboratif dengan sektor energi untuk menghasilkan energi melalui limbah• UU No. 18/2008 memberikan insentif untuk mengurangi sampah dan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah.
Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Praktik dan inisiatif pertanian yang cerdas iklim di berbagai lokasi di Indonesia, misalnya Saung Iklim untuk petani kecil.• Pengembangan rantai pasok/nilai pertanian yang berkelanjutan dan inklusif untuk koperasi petani dan petani perempuan yang terpinggirkan.

Bagian 3. Rekomendasi

3.1. Untuk Pemerintah Nasional dan Daerah Macroeconomic and sectoral pillar (social and economic development)

Memastikan koherensi dari kebijakan dan pengaturan kelembagaan terkait transisi berkeadilan:

1. (Menyelaraskan rencana dan program pembangunan nasional/daerah dengan komitmen terhadap aksi iklim (yaitu NDC, LTS-LCCR, RAN/RAD-GRK, RAN/RAD-API).
2. Mengintegrasikan prinsip transisi berkeadilan ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah
3. Mengarus-utamakan pembangunan yang berkelanjutan di semua bidang, termasuk kerja sama dan koordinasi antara otoritas ketenagakerjaan dan mitranya di berbagai sektor.
4. Mendorong koordinasi yang efektif dan kerja sama yang erat antar lembaga untuk menentukan kebijakan dan program yang dapat beradaptasi dengan perubahan fiskal dan politik.
5. Membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan teknis

Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dan transisi berkeadilan ke dalam kebijakan pertumbuhan dan ekonomi makro/daerah:

1. Melakukan kajian di tingkat negara/daerah tentang lapangan kerja, dampak sosial dan ekonomi dari transisi iklim, dan mengevaluasi potensi pekerjaan yang ramah lingkungan.
2. Mendorong investasi ekonomi yang pro-kaum miskin dan pro-iklim untuk daerah dan masyarakat yang mengalami transisi (berinvestasi pada infrastruktur rendah emisi yang menciptakan lapangan pekerjaan yang layak)
3. Menetapkan strategi untuk diversifikasi ekonomi lokal
4. Mengkatalisasi peluang ekonomi baru dan mendorong produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (yaitu kebijakan fiskal, pengadaan publik, dan kebijakan investasi)

Menetapkan rencana, strategi dan dana nasional/daerah untuk transisi berkeadilan

1. Mengembangkan kerangka kerja nasional dan badan pengelola untuk transisi berkeadilan di Indonesia
2. Membuat database terpusat dan dapat diakses seputar pekerja yang mungkin terpengaruh oleh transisi berkeadilan untuk mendukung perencanaan daerah
3. Mengembangkan indikator untuk memonitor dan mengevaluasi transisi yang adil dan menyesuaikan strategi sebagaimana mestinya.

Pilar ketenagakerjaan (pekerjaan yang layak dan perlindungan pekerja)

- Mengembangkan dukungan khusus bagi pekerja, masyarakat dan wilayah dengan fokus pada pemberian pelatihan ulang, keterampilan ulang, dan formalisasi pekerjaan bagi pekerja yang rentan.
- Mempromosikan dan menetapkan sistem perlindungan sosial yang memadai (seperti layanan kesehatan, jaminan penghasilan, dan layanan sosial).
- Mempromosikan dan menetapkan sistem yang memadai untuk menjamin hak-hak di tempat kerja dan ketenagakerjaan
- Mempromosikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin perlindungan sosial, termasuk melalui pertukaran data dan pengembangan program pelatihan
- Meningkatkan ketangguhan dari usaha-usaha dan memberikan perhatian khusus untuk membantu UMKM, termasuk koperasi dan juga sektor informal
- Berkolaborasi dengan dunia bisnis dalam merancang dan menerapkan program pelatihan yang efektif bagi para pekerja dan masyarakat yang terkena dampak

Pilar sosial (kesetaraan, inklusi sosial dan keadilan)

- Memasukkan pertimbangan gender, kesetaraan, dan inklusi sosial ke dalam semua kebijakan dan program
- Memastikan distribusi manfaat transisi dan menghindari risiko dampak negatif yang tidak proporsional (besar) pada populasi yang rentan
- Memastikan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif yang mencakup perempuan, pemuda, masyarakat yang kurang beruntung dan marginal, serta masyarakat adat

Partisipasi aktif masyarakat (dialog sosial)

- Secara aktif mempromosikan dan terlibat dalam proses dialog sosial multi-pihak di semua tahapan proses kebijakan untuk menjalin konsensus dalam proses transisi
- Mempromosikan pembuatan, pengembangan, dan formalisasi mekanisme dan struktur dialog
- Meningkatkan dampak melalui kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan pertukaran praktik terbaik
- Menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rendah karbon (seperti dengan penggunaan sumber energi terbarukan di gedung-gedung publik, penggunaan kendaraan listrik di kantor-kantor publik).

Bagian 3. Rekomendasi

3.2. Untuk Aktor Non-pemerintah

Pilar ekonomi makro dan sektoral (pembangunan sosial dan ekonomi)

- Secara aktif berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai kebijakan ekonomi makro dan sektoral yang ramah lingkungan
- Memobilisasi pendanaan, dukungan, dan bantuan, yang difasilitasi oleh organisasi dan donor internasional
- Mendukung komersialisasi dan penyebaran teknologi hijau beserta cara-caranya
- Mempromosikan kerja sama:
 - di tingkat nasional dengan para otoritas dalam mengembangkan, menerapkan, dan memantau kebijakan sesuai dengan praktik nasional
 - di tingkat lokal, di mana otoritas lokal, pengusaha, serikat pekerja dan lembaga penelitian dan pelatihan perlu bekerja sama secara efektif untuk dapat mengintegrasikan langkah-langkah transisi yang adil menuju pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan
 - dengan bisnis dan perusahaan untuk mengubah kegiatan ekonomi dan model usaha dari kegiatan yang merusak lingkungan, menetapkan rencana nyata untuk pengurangan emisi, dan memastikan bahwa pengungkapan informasi terkait iklim oleh perusahaan juga mencakup pengungkapan risiko ketenagakerjaan dan rencana transisi berkeadilan.

Pilar ketenagakerjaan (pekerjaan yang layak dan perlindungan pekerja)

- Mempromosikan dimasukkannya ketentuan spesifik terkait lingkungan atau tenaga kerja (seperti, pelatihan ulang dan penempatan ulang) melalui perundingan dan kesepakatan bersama.
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan dan menerapkan dukungan khusus bagi para pekerja dan masyarakat setempat yang terkena dampak
- Membantu bisnis/perusahaan, khususnya UMKM, dalam keterlibatan mereka dengan pemerintah dan penyedia pelatihan terkait manajemen dan peningkatan keterampilan tenaga kerja mereka saat ini, dan mengantisipasi profil pekerjaan dan kebutuhan keterampilan di masa mendatang.

Pilar sosial (kesetaraan, inklusi sosial, dan keadilan)

- Secara aktif berbagi pengetahuan dan praktik terbaik terkait gender, kesetaraan, dan inklusi sosial
- Berpartisipasi aktif dalam mengatasi dan memulihkan dampak sosial-lingkungan yang negatif yang timbul dari kegiatan ekonomi serta dampak sosial yang terkait dengan transisi.

Partisipasi aktif masyarakat (dialog sosial)

- Meningkatkan kesadaran & pemahaman serta memberikan panduan kepada anggota masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan, transisi yang adil, pekerjaan yang layak, dan pekerjaan yang ramah lingkungan, misalnya melalui kampanye, pelatihan dan pendidikan, penelitian, dan penjangkauan media.
- Berperan aktif dalam perumusan, implementasi, dan pemantauan kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional dan daerah
- Memaparkan peran penting dari organisasi pengusaha dan pekerja dalam mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pekerjaan yang layak dan inklusi sosial;
- Mempromosikan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam dialog sosial di semua tingkatan.

Bagian 3. Rekomendasi

3.3. Untuk Perusahaan (Bisnis)

Rekomendasi berikut ini menunjukkan cara perusahaan merencanakan dan mengimplementasi transisi yang adil.

Sumber: [UN Global Compact, 2022.](#)

Tindakan prioritas	Memajukan Pekerjaan yang Layak Ketenagakerjaan - Hak di Tempat Kerja - Dialog Sosial - Perlindungan Sosial	Mempromosikan Inklusi Sosial Peluang - Akses ke sumber daya - Suara - Menghormati hak
Membuat peta	Membuat peta keterlibatan internal (<i>internal engagement</i>) untuk transisi berkeadilan	
Menetapkan landasan	Menetapkan landasan melalui kebijakan dan praktik yang kuat untuk menghormati hak-hak di tempat kerja dan hak asasi manusia lainnya.	
	<p>Menghormati hak-hak di tempat kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama penghapusan pekerja anak, kerja paksa, dan diskriminasi tempat kerja yang sehat dan aman <p>Mempromosikan kesetaraan dan keragaman gender, keadilan dan inklusi di tempat kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menghormati hak asasi manusia dan menghapus keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia Sejalan dengan prinsip-prinsip internasional tentang perilaku usaha yang bertanggung jawab
Melibatkan	<p>Melibatkan organisasi pekerja dalam dialog sosial, khususnya dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana seputar restrukturisasi dan aset terlantar Strategi dekarbonisasi Strategi dengan dampak ketenagakerjaan yang besar Perluasan operasi hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Mengarusutamakan keterlibatan pemangku kepentingan yang adil dan kuat dari semua kelompok yang terkena dampak ke dalam perencanaan bisnis, terutama di saat transisi nol bersih menghadirkan pasar yang baru, rantai pasokan baru, pemangku kepentingan baru Menjamin dijunjung tingginya prinsip partisipasi yang adil dan inklusif
Merencanakan	Membuat rencana usaha jangka panjang yang mengintegrasikan prinsip transisi berkeadilan	
	<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan kajian tentang dampak ketenagakerjaan, memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pelatihan ulang/peningkatan keterampilan Meresmikan lapangan kerja bagi para pekerja di sektor/ekonomi informal Memanfaatkan langkah yang pernah ditempuh untuk memajukan pekerjaan yang layak di seluruh rantai pasokan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kelompok rentan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat Mengintegrasikan tinjauan-tinjauan tentang dampak sosio-ekonomi berbasis tempat Mendukung akses setara bagi konsumen ke produk-produk rendah karbon yang aman
Mengambil tindakan	Mengambil tindakan untuk melaksanakan rencana transisi di segala acara bisnis yang relevan, mengintegrasikan dialog sosial yang berlangsung, dan melaksanakan uji tuntas terhadap dampak hak asasi manusia dan lingkungan serta keterkaitannya.	
Bermitra	Bermitra dengan pemerintah, organisasi pengusaha, inisiatif regional/sektoral, dan di sepanjang rantai pasokan untuk mengambil tindakan yang lebih terkoordinasi.	
Mempelajari - mengintegrasikan - berkomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi metrik (indikator) untuk transisi. Mengukur dan melaporkan tindakan, tantangan, dan dampak yang terkait dengan transisi yang adil, untuk mendorong pembelajaran, kerja sama, dan akuntabilitas. 	

Bagian 3. Rekomendasi

3.4. Checklist Perencanaan Transisi yang Adil

Checklist berikut ini menyediakan unsur-unsur penting yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan transisi yang adil:

Landasan

- Memahami konsep.** Pastikan bahwa pemangku kepentingan utama memiliki pemahaman konseptual dasar tentang transisi berkeadilan (misalnya, melalui program peningkatan kesadaran dan berbagi pengetahuan & informasi).
- Menentukan wilayah (area),** melalui kriteria pemilihan, seperti:
 - Adanya industri padat karbon yang dominan
 - Persentase yang signifikan dari populasi yang bekerja di dalam industri tersebut
 - Perekonomian lokal secara langsung atau tidak langsung bergantung pada industri tersebut
- Mengenal potensi yang ada.**
 - Mengumpulkan data dan informasi (seperti demografis, tenaga kerja, lingkungan usaha) untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan teritorial dari transisi, serta peluang yang tercipta dari sana.
 - Merencanakan dukungan (seperti, pelatihan ulang, perlindungan sosial) bagi pemangku kepentingan yang akan terkena dampak.

Melibatkan semua pemangku kepentingan (partisipasi publik)

- Kesepakatan dari para pengambil keputusan.** Seluruh pemangku kepentingan harus menyepakati visi dan ruang lingkup transisi
 - Visi: arah dan tujuan dari transisi
 - Lingkup: pekerja (buruh), masyarakat, rantai nilai, warga masyarakat
- Membuat garis besar proses transisi yang diharapkan,** termasuk:
 - Pendekatan: top-down atau bottom up
 - Kepemimpinan: transisi yang dipimpin oleh pemerintah, dipimpin oleh perusahaan, atau dipimpin oleh masyarakat
- Dialog sosial (konsultasi masyarakat)**
 - Mengajak pemangku kepentingan yang lebih luas (misalnya, masyarakat adat, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya) dan memastikan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
 - Mengembangkan mekanisme keterlibatan/dialog (proses yang partisipatif dan inklusif)
 - Membangun kemitraan

Membangun kerangka tindakan

- Struktur tata kelola** yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pemerintah dan non-pemerintah):
 - Membentuk badan dan mekanisme untuk melakukan koordinasi dan pemantauan
 - Mengembangkan sistem check and balance (saling mengontrol dan menjaga keseimbangan) untuk menjamin pengambilan keputusan yang adil dan transparan
 - Mendirikan pusat pengetahuan dan pengembangan untuk transisi berkeadilan
- Strategi implementasi**
 - Sinkronisasi secara konsisten dengan strategi dan rencana nasional, regional, atau daerah lainnya
 - Mengembangkan peta jalan untuk mencapai tujuan dan visi dari transisi (seperti teori perubahan)
 - Mengidentifikasi langkah-langkah dan strategi untuk:
 - diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri ramah lingkungan/hijau yang baru
 - memastikan distribusi manfaat yang adil dan aman serta mitigasi kerugian/risiko
 - mendukung pekerja yang kehilangan tempat tinggal, keluarga mereka, serta masyarakat luas yang terkena dampak dari penutupan usaha maupun PHK, melalui pemberian keterampilan ulang, perekrutan kembali, dan pelatihan yang pada akhirnya bisa memberikan mereka pekerjaan yang layak
 - mengatasi diskriminasi gender, ras, dan kelas.
- Kebutuhan dan sumber pendanaan.** Mengidentifikasi
 - jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan transisi,
 - semua sumber pendanaan dan kesenjangan pendanaan,
 - rencana untuk mengatasi bila ada kesenjangan dari pendanaan tersebut,
 - instrumen dan mekanisme pendanaan.
- Strategi komunikasi.**
 - Mengembangkan rencana untuk menyampaikan pesan-pesan kepada audiens (internal dan eksternal)
- Pemantauan dan evaluasi.**
 - Mengembangkan kerangka kerja untuk melacak kemajuan transisi, termasuk menentukan metrik/indikator kualitatif dan kuantitatif.

Lampiran 1. Daftar Studi Kasus Lainnya

Tabel 5 memberikan beberapa referensi lebih lanjut yang mensintesis informasi tentang kegiatan transisi di masa lalu, sebagai literatur lanjutan.

Tabel 5. Daftar studi kasus lain untuk literatur lanjutan

#	Title and Summary	Links
1	<i>Coal Transitions: Research and Dialogue on the Future of Coal.</i> Studi ini menampilkan publikasi dari berbagai negara (misalnya, Australia, Tiongkok, Jerman, India, Polandia, Afrika Selatan, Spanyol, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Republik Ceko), yang merangkum wawasan utama dari proyek penelitian Transisi Batu Bara.	https://www.iddri.org/en/project/coal-transitions-research-and-dialogue-future-coal
2	<i>Managing Coal Mine Closure: Achieving a Just Transition for All.</i> Laporan ini mengulas bukti penutupan tambang di seluruh dunia dan mengacu pada pengalaman dari 11 proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia, selain juga pengalaman global lainnya.	https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/484541544643269894/managing-coal-mine-closure-achieving-a-just-transition-for-all
3	<i>Understanding Just Transitions in Coal Dependent Communities: Case Studies from Mpumalanga, South Africa, and Jharkhand, India.</i> Berdasarkan studi kasus Mpumalanga dan Jharkhand, laporan ini memberikan wawasan dan rekomendasi untuk transisi yang adil terkait batu bara di negara berkembang.	https://justtransitioninitiative.org/understanding-just-transitions-in-coal-dependent-communities/
4	<i>Just transition in 7 central and eastern European countries: What works and what does not.</i> Dokumen ini menganalisis proses transisi yang adil, termasuk tantangan dan faktor keberhasilan di tujuh negara Eropa tengah dan timur, yaitu Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia.	https://www.just-transition.info/wp-content/uploads/2022/04/2022-04_Just-Transition-in-7-CEECs.pdf
5	<i>How can socio-economic transitions be better managed? Lessons from four historical cases of industrial transition.</i> Laporan ini menggunakan 4 studi kasus dari seluruh dunia (Australia, Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Afrika Selatan) untuk mengambil pelajaran tentang bagaimana suatu kota dan wilayah dapat mengelola penurunan kegiatan industri dan pertambangan besar secara adil dan meminimalkan gangguan terhadap ekonomi lokal.	https://www.sei.org/publications/lessons-from-industrial-transitions/
6	<i>A Just Transition for Climate Change Adaptation: Towards Just Resilience and Security in a Globalising World.</i> Studi ini menyajikan kerangka kerja baru untuk transisi yang adil untuk diadaptasi, dengan tujuan mencapai ketangguhan global yang adil. Ringkasan lengkap memberikan dua studi kasus yang menunjukkan kegunaan kerangka kerja untuk menganalisis dan memajukan ketangguhan global yang adil: (1) Perdagangan dalam pertanian dan transisi yang adil dalam rantai pasokan kopi Brasil dan (2) Transisi yang adil untuk adaptasi di Blue Nile Basin.	https://adaptationwithoutborders.org/knowledge-base/transnational-climate-impacts/a-just-transition-for-climate-change-adaptation-towards-just-resilience-and-security-in-a-globalising-world
7	<i>Navigating coal mining closure and societal change: learning from past cases of mining decline.</i> Makalah ini meninjau dasar pengetahuan yang ada untuk lebih memahami konsekuensi ekonomi, sosial dan politik dari penutupan tambang pada skala nasional dan subnasional.	https://www.sei.org/publications/navigating-coal-mining-closure-and-societal-change/
8	<i>Just Transitions: a comparative perspective.</i> Publikasi ini memberikan ikhtisar tentang seberapa jauh lima negara yang berbeda (AS, Kanada, Jerman, Norwegia, dan Peru) telah melangkah dalam menanamkan prinsip-prinsip luas yang terkandung dalam 'transisi yang adil' ke dalam rencana, strategi, kebijakan, dan kegiatan mereka.	https://www.gov.scot/publications/transitions-comparative-perspective/

Lampiran 1. Daftar Studi Kasus Lainnya

9	<i>Closure of steelworks in Newcastle, Australia: lessons from industrial transitions.</i> Laporan singkat ini mengkaji penurunan dan penutupan pabrik baja besar di Newcastle, Australia, yang merupakan bagian dari rangkaian kasus bersejarah terkait penurunan kegiatan industri atau pertambangan besar.	https://www.sei.org/publications/newcastle-steelworks/
10	<i>Collapse of the Free State Goldfields, South Africa: lessons from industrial transitions.</i> Laporan singkat ini mengkaji keruntuhan pertambangan emas di Free State, Afrika Selatan, yang merupakan bagian dari rangkaian kasus bersejarah terkait penurunan kegiatan industri atau pertambangan besar.	https://www.sei.org/publications/free-state-goldfields-collapse/
11	<i>Closure of the Kodak plant in Rochester, United States: lessons from industrial transitions.</i> Laporan singkat ini mengkaji penurunan dan penutupan pabrik Kodak di Rochester, yang merupakan bagian dari rangkaian kasus bersejarah terkait penurunan kegiatan industri atau pertambangan besar.	https://www.sei.org/publications/kodak-plan-rochester/
12	<i>IGF CASE STUDY: Achieving a Successful Post-Mining Transition with Renewable Energy.</i> Laporan ini mengkaji bagaimana dua bekas lokasi tambang diubah menjadi ruang penghasil energi terbarukan di British Columbia, Kanada dan Ruhr, Jerman.	https://www.iisd.org/publications/igf-case-study-post-mining-transition-renewable-energy
13	<i>German Just Transition: A Review of Public Policies to Assist German Coal Communities in Transition.</i> Laporan ini mengkaji pelajaran penting dari penurunan produksi batu bara di Jerman untuk menyoroti kebijakan yang mendukung pekerja dan masyarakat dalam transisi energi.	https://www.rff.org/publications/reports/german-just-transition-a-review-of-public-policies-to-assist-german-coal-communities-in-transition/
14	<i>Ensuring a Just Energy Transition in Indonesia: Lessons learned from Country Case Studies.</i> Studi ini menyoroti kemungkinan dampak transisi energi di Indonesia, terutama dari aspek sosial dan ekonomi, untuk memastikan transisi energi yang adil. Pengalaman transisi energi empat negara yaitu Jerman, Afrika Selatan, Australia, dan Kanada menjadi contoh bagi Indonesia untuk merencanakan transisi energi yang adil.	https://iesr.or.id/en/pustaka/ensuring-a-just-energy-transition-in-indonesia-lessons-learned-from-country-case-studies-iesr-2020

Lampiran 2. Country Platform Indonesia – Energy Transition Mechanism (ETM-CP)

Kotak 1. Country Platform Indonesia - Energy Transition Mechanism (ETM-CP) (dikelola oleh PT. SMI di bawah Kementerian Keuangan)

Salah satu wujud upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai komitmen NDC dan target emisi nol bersih di sektor energi adalah ETM-CP yang baru diumumkan. ETM-CP diperkirakan terdiri dari dua elemen, yaitu (i) Fasilitas Energi Bersih (*Clean Energy Facility* atau CEF) yang berfokus pada pengembangan proyek energi terbarukan, dan (ii) Fasilitas Pengurangan Karbon (*Carbon Reduction Facility* atau CRF) dengan fokus pada penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) akan bertindak sebagai operator platform dan pengelola dana. ETM-CP sendiri merupakan kerangka kerja untuk menyediakan pendanaan yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan cara yang “adil dan terjangkau”.

ETM-CP diharapkan dapat menjadi *platform* untuk memobilisasi pendanaan di mana investasi akan berasal dari perpaduan pendanaan (anggaran pemerintah dan non-pemerintah seperti donor, lembaga pembangunan, filantropi, dan sektor swasta). Sumber pembiayaan terpenting diharapkan datang dari industri, sektor swasta, dan lembaga keuangan karena anggaran pemerintah hanya dapat menutupi sekitar sepertiga dari biaya yang diproyeksikan. Saat ini, *platform* ETM-CP masih berfokus pada penghentian pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan belum menyentuh masa depan penutupan tambang batu bara. Sebagai negara pengekspor batu bara terbesar yang pembangkit listriknya juga bergantung pada batu bara, transisi batu bara di Indonesia dapat terjadi dalam dua bentuk: penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara atau penutupan tambang batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara dan tambang batu bara terletak di lokasi yang berbeda dengan jenis operasi dan rantai nilai yang berbeda pula, oleh karena itu kedua jenis transisi batu bara ini akan menciptakan dampak sosial ekonomi yang berbeda.

Strategic Environment and Social Assessment (SESA), termasuk isu transisi pekerjaan yang layak, direncanakan menjadi bagian dari desain *country platform* ETM-CP. Mekanisme alih fungsi dan pengembangan untuk mengakomodasi transisi dari *brown jobs* ke *green jobs* akan dimasukkan ke dalam program investasi ETM-CP. Namun, belum ada perincian lebih lanjut tentang bagaimana hal tersebut akan diterapkan karena *platform* masih dikembangkan. Pemerintah telah mengakui bahwa biaya sosial dari transisi energi dapat menjadi mahal jika tidak dikomunikasikan dengan baik karena mengarah pada informasi dan harapan yang tidak simetris. Oleh karena itu, narasi “transisi yang adil dan terjangkau” harus dikonsultasikan dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan. Menyadari pentingnya partisipasi pemangku kepentingan melalui dialog sosial, maka desain rencana investasi dan struktur pembiayaan juga harus memperhatikan tema keadilan prosedural/partisipatif, misalnya seberapa inklusif keputusan tentang cara pembiayaan, dan dalam bentuk apa pembiayaan tersebut.

Selain itu, ETM *country platform* juga harus disesuaikan dan diadaptasi dengan konteks lokal (daerah) di mana transisi pada akhirnya akan berlangsung, untuk memastikannya adil dan inklusif. Menyesuaikan rencana dan kegiatan transisi energi dengan kebutuhan lokal dengan melibatkan dan mengajak pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sejak awal fase desain melalui dialog sosial sangatlah penting. Sebuah transisi yang dirancang bersama dengan cara mengakomodasi semua suara (pendekatan *bottom-up*), terutama kelompok yang akan terpengaruh dan mereka yang secara historis dirugikan akan menaikkan tingkat keberhasilan transisi itu sendiri dan juga memungkinkan terjadinya transisi yang lebih adil merata dan inklusif.

References

- ADB. (2021). ADB, Indonesia, the Philippines Launch Partnership to Set Up Energy. <https://www.adb.org/news/adb-indonesia-philippines-launch-partnership-set-energy-transition-mechanism>
- AMFORI. (2020). Step-by-Step guidance: implementing social dialogue on gender equality and women's empowerment. <https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-08-26-Social-Dialogue-Handbook-on-Gender.pdf>
- APEC. (2018). *MINE CLOSURE Checklist for Governments*. APEC Mining Task Force. https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2018/3/Mine-Closure-Checklist-for-Governments/218_MTF_Mine-Closure_Checklist-for-Governments.pdf
- Atteridge, A., & Strambo, C. (2020). *Seven principles to realize a just transition to a low-carbon economy*. Stockholm Environment Institute.
- Bevan, C. (2021, November 4). *Supporting the conditions for a just transition internationally*. UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. <https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-internationally/>
- Cabinet Office of UK Government. 2022. *Indonesia Just Energy Transition Partnership Launched at G20*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/indonesia-just-energy-transition-partnership-launched-at-g20>
- Corriveau-Bourque, A. (2021). *Land Tenure in a Just Rural Transition - Restoring our Relationships to Land and Natural Resources*. Just Rural Transition. https://s31207.pcdn.co/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/JRT_Land-Tenure_FINAL_Low.pdf
- Dlouhy, Jennifer A., & Justin Sink. (2022). *Biden, Jokowi Unveil \$20 Billion Deal to End Coal in Indonesia*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-15/biden-jokowi-unveil-20-billion-deal-to-wean-indonesia-off-coal>
- Emden, J., Ahmad, H., Murphy, L., & Cameron, C. (2020). *JUST TRANSITIONS FROM AROUND THE WORLD*. <https://www.ippr.org/files/2020-12/lessons-learned-dec2020.pdf>
- European Commission. (2020). *Toolkit - Environmental Rehabilitation and Repurposing: Guidance on the Governance of Environmental Rehabilitation and Repurposing in Coal Regions in Transition*. European Commission. https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-05/environmental_rehabilitation_and_repurposing_toolkit_-_platform_for_coal_regions_in_transition_0.pdf
- European Commission. (2022). *The EU and International Partners Launch Ground-Breaking Just Energy Transition Partnership with Indonesia*. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6926
- Ferrer Márquez, A., Gil, B. M. T., & López Maeztu, O. (2019). *The Contribution of Social Dialogue to the 2030 Agenda Promoting a Just Transition towards Sustainable Economies and Societies for All*. Trade Union Development Cooperation Network.
- Gabriella, M. and Simamora, P. (2020). *Ensuring a Just Energy Transition in Indonesia: Lessons Learned from Country Case Studies*. <https://iesr.or.id/en/pustaka/ensuring-a-just-energy-transition-in-indonesia-lessons-learned-from-country-case-studies-iesr-2020>
- GFANZ. (2022). *Expectation for Real-Economy Transition Plans*. Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). <https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2022/09/Expectations-for-Real-economy-Transition-Plans-September-2022.pdf>
- Glynn, P. J., Błachowicz, A., & Nicholls, M. (2020). *Incorporating Just Transition Strategies in Developing Countries Nationally Determined Contributions*. In W. Leal Filho, J. Luetz, & D. Ayal (Eds.), *Handbook of Climate Change Management: Research, Leadership, Transformation* (pp. 1–21). Springer International Publishing.
- Hocquet, R. (2021). *A Just Transition for Climate Change Adaptation: Towards Just Resilience and Security in a Globalising World*. *Adaptation Without Border*. <https://adaptationwithoutborders.org/knowledge-base/transnational-climate-impacts/a-just-transition-for-climate-change-adaptation-towards-just-resilience-and-security-in-a-globalising-world>
- IEA. (2021). *Recommendations of the global commission on people-centred clean energy transitions*. International Energy Agency (IEA).

References

- ILO. (2015). *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*. International Labour Organization.
- ILO. (2013). National Tripartite Social Dialogue: An ILO guide for improved governance. https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_231193/lang--en/index.htm
- ILO. (n.d.). Social Dialogue: Finding a Common Voice. ILO. <https://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf>
- ILO, & OECD. (n.d.). Achieving Decent Work and Inclusive Growth: the Business Case for Social Dialogue. https://www.theglobaldeal.com/resources/Thematic-Brief-Achieving-Decent-Work-and-Inclusive-Growth_The-Business-Case-for-Social-Dialogue.pdf
- Just Transition Fund. (n.d.). *Planning for Just Transition [step 1]: Take Stock*. Just Transition Fund. <https://justtransitionfund.org/resources/planning-for-just-transition-step-1-take-stock/>
- Jong, Hans Nicholas. (2022). *Indonesia Seals \$20 Billion Deal with G7 to Speed up Clean Energy Transition*. Mongabay Environmental News. <https://news.mongabay.com/2022/11/indonesia-seals-20-billion-deal-with-g7-to-speed-up-clean-energy-transition/>
- KSBSI. (2021). Pernyataan Sikap Serikat Buruh Pekerja Indonesia Tentang Climate Change dan Transisi Berkeadilan. <https://www.ksbsi.org/home/read/1514/Pernyataan-Sikap-Serikat-Buruh-Pekerja-Indonesia-Tentang-Climate-Change-dan-Transisi-Berkeadilan>
- La Hovary, L. O. & C. (Ed.). (2021). *User's manual to the ILO's Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*. International Labour Organization.
- Montmasson-Clair, G. (2021). *A Policy Toolbox for Just Transitions*. Trade and Industrial Policy Strategies.
- Mustață, Alexandru, & Victoria Shevchuk. (2021). *Eight Steps for a Just Transition in the Western Balkans*. Bankwatch Network. <https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2021/05/EN-Eight-steps-for-a-just-transition-in-the-Western-Balkans-Apr-2021-1.pdf>
- OECD. (2018). Facilitating social dialogue under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. <https://www.oecd.org/investment/mne/Facilitating-social-dialogue-under-the-OECD-Guidelines-for-MNEs.pdf>
- Pinker, Annabel. (2020). *Just Transitions: A Comparative Perspective*. The James Hutton Institute & SEFARI Gateway. <https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/independent-report/2020/08/transitions-comparative-perspective2/documents/transitions-comparative-perspective/transitions-comparative-perspective/govscot%3Adocument/transitions-comparative-perspective.pdf>
- Robins, N., Brunsting, V., & Wood, D. (2018). Climate Change and the Just Transition: A guide for investor action. *Centre for Climate Change Economics and Policy, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, and Initiative on Responsible Investment* http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2018/12/Climate-Change-and-Thejust-transition_Guide-for-Investor-Action.Pdf
- Robins, N., & Rydge, J. (2019). Why a just transition is crucial for effective climate action. *Inevitable Policy Response Series*. London: Vivid Economics Limited. <https://www.unpri.org/inevitable-policy-response/why-a-just-transition-is-crucial-for-effective-climate-action/4785>. Article
- Sartor, Oliver. (2018). *Implementing Coal Transition - Insights from Case Studies of Major Coal-Consuming Economies*. IDDRI. <https://www.iddri.org/en/publications-and-events/report/implementing-coal-transition-insights-case-studies-major-coal>
- Strambo, Claudia, May Thazin Aung, and Aaron Atteridge. (2019). *Navigating Coal Mining Closure and Societal Change: Learning from Past Cases of Mining Decline*. Stockholm Environment Institute (SEI). <https://www.sei.org/publications/navigating-coal-mining-closure-and-societal-change/>

References

- SMI. (2022). *Indonesia Launches ETM Country Platform*. PT SMI. <https://ptsmi.co.id/indonesia-launches-etm-country-platform-to-accelerate-just-and-affordable-energy-transition>
- Smith, S. (2020). *Just Transition a Report for the OECD*. 2017. Available in: <https://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-Report-Just-Transition>. Pdf Access in, 20.
- UN Global Compact. (2022). *Introduction to Just Transition: A Business Brief*. <https://www.unglobalcompact.org/library/6093>
- World Bank. (2018). *Managing Coal Mine Closure: Achieving a Just Transition for All*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/484541544643269894/pdf/130659-REVISED-PUBLIC-Managing-Coal-Mine-Closure-Achieving-a-Just-Transition-for-All-November-2018-final.pdf>
- World Benchmarking Alliance. (2021). *Just Transition Assessment 2021 - Are high-emitting companies putting people at the heart of decarbonisation?* World Benchmarking Alliance. https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2021/11/2021_JustTransitionAssessment.pdf
- World Energy Council. (2019). *World Energy Council Transition Toolkit User Guide (Version 1)*. World Energy Council. <https://www.worldenergy.org/transition-toolkit/transition-toolkit-guide>
- Wuppertal Institute (2022). *Just Transition Toolbox For coal regions*. <https://www.coaltransitions-toolbox.org/>

**Pelajari lebih lanjut tentang
South to South Just Transitions
dan karya kami lainnya di:
[climatestrategies.org/
projects/south-to-south-just-
transitions/](https://climatestrategies.org/projects/south-to-south-just-transitions/)**